



2 DEKADE REZIM APUPPT, PERSEMBAHAN PPKATK UNTUK INDONESIA



LAPORAN SEMESTER 1
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2022

VISI



Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

MISI

01. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.
 02. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
 03. Meningkatkan keandalan sistem informasi.
 04. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.
- 

TUGAS

- 01 mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 02 mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme



FUNGSI

- 01 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- 02 Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- 03 Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
- 04 Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya; dan
- 05 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

KEWENANGAN

Kewenangan dalam Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

- Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan
- Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan

pengembangan hasil analisis PPATK; Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; dan Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.



INTEGRITAS

1



4

SINERGI



4

NILAI DASAR
PPATK

KAPABILITAS

2



3

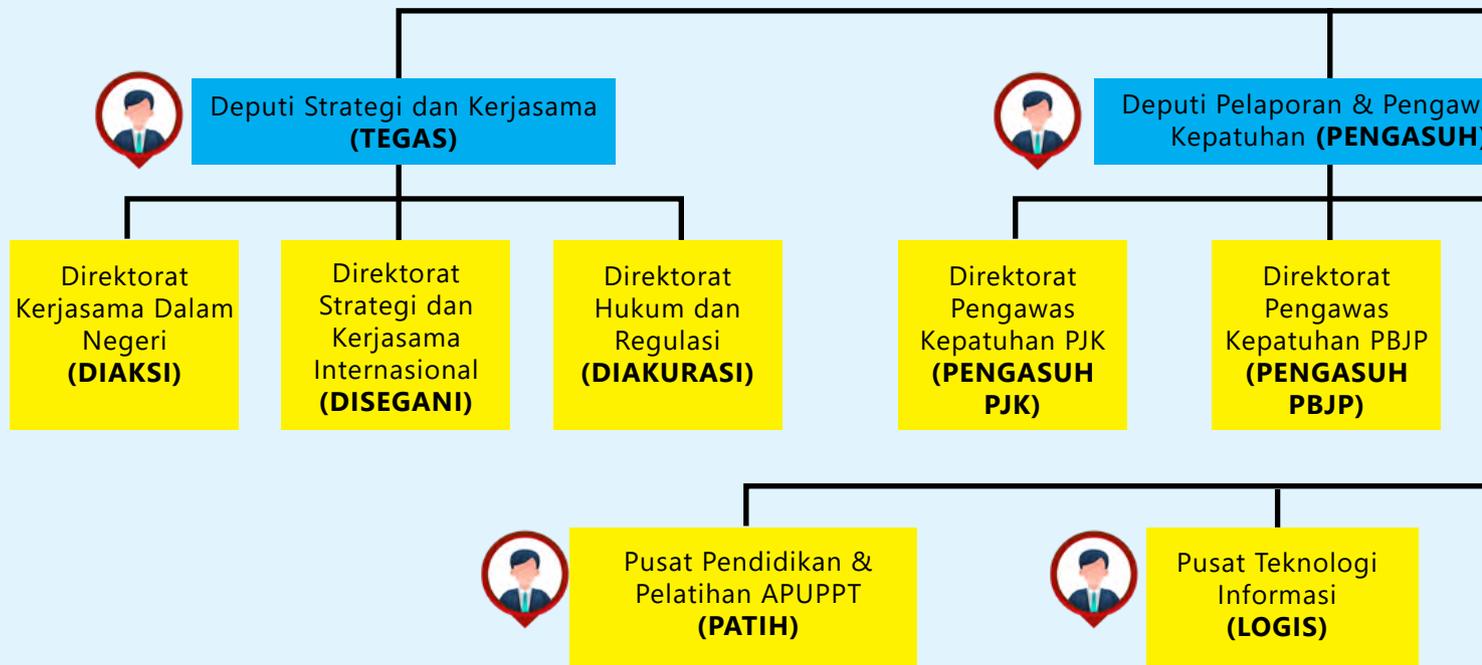
KOMITMEN

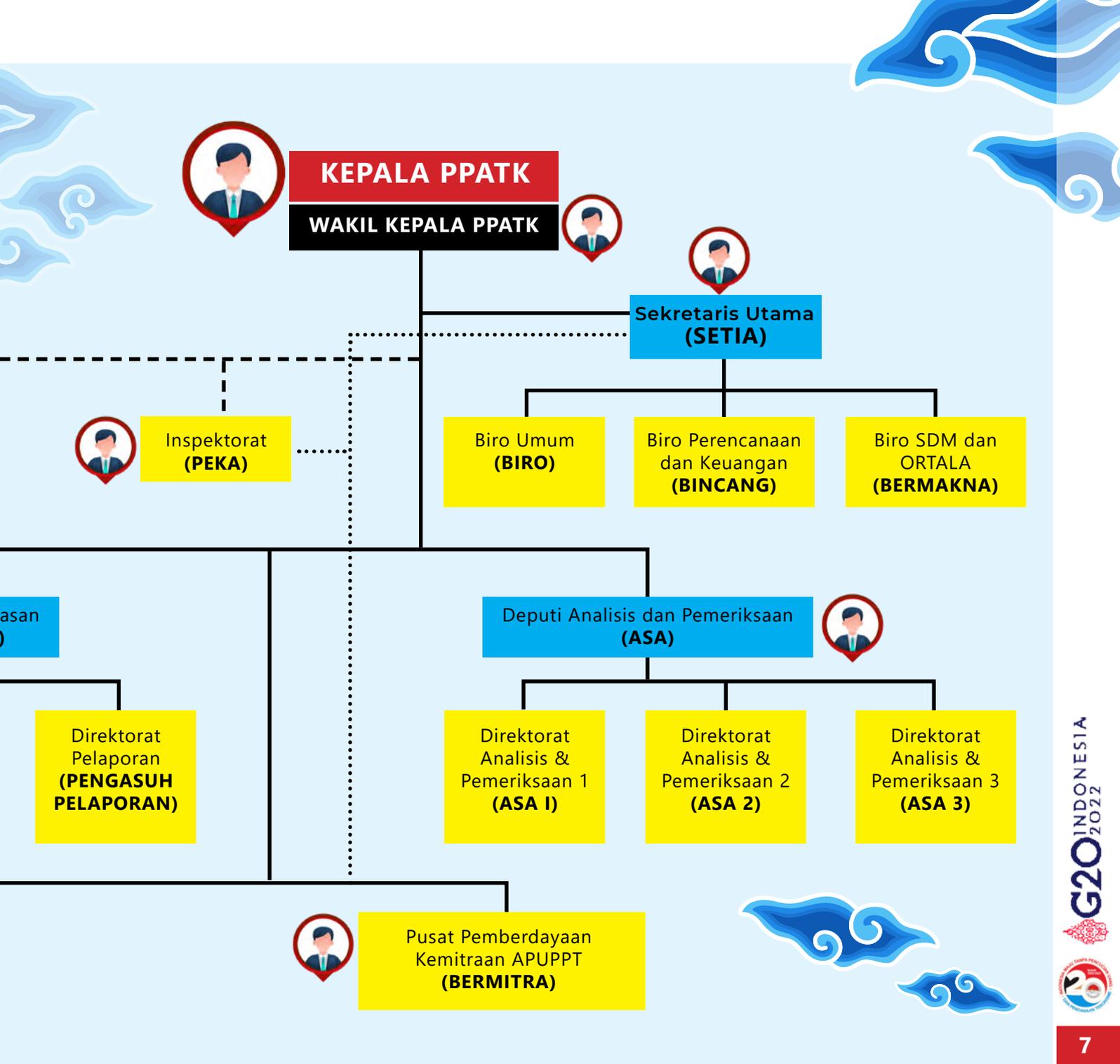


STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tenaga Ahli





STRATEGI NASIONAL



PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024

STRATEGI

01

Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko;

STRATEGI

02

Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;

STRATEGI

03

Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; dan

STRATEGI

04

Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko;

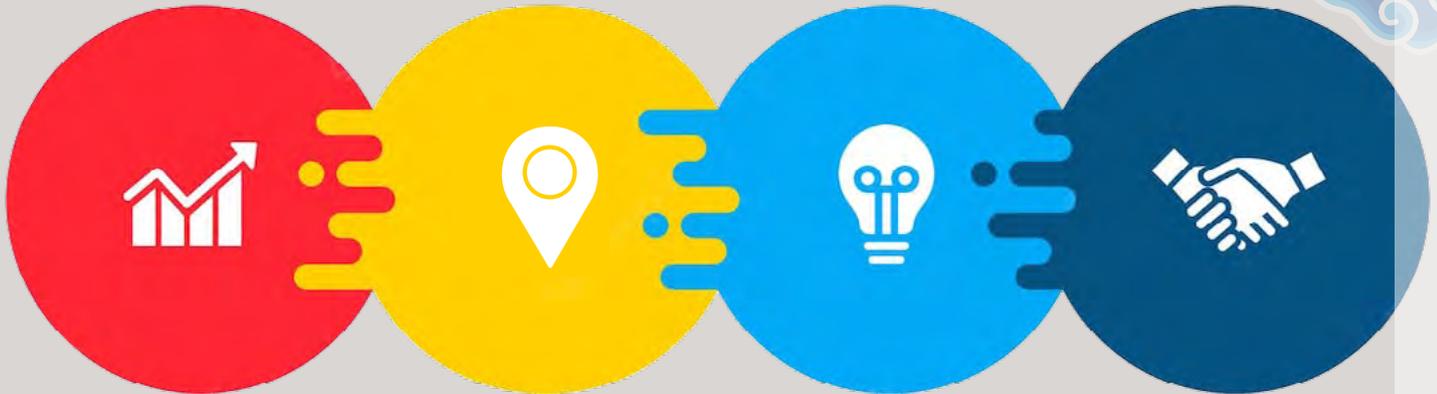
STRATEGI

05

Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal



RENCANA STRATEGIS



TUJUAN

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia

TARGET

2020 : 5.46
2021 : 5.73
2022 : 6.16
2023 : 6.78
2024 : 7.63

KATA PIMPINAN



Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Pimpinan dan Staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus bekerja dan berkarya membawa PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Semester PPATK 2022 meliputi berbagai capaian selama tahun 2022 berjalan. Berbagai capaian tersebut antara lain terkait upaya PPATK menjaga stabilitas dan integritas sistim keuangan, peran PPATK dalam memerangi *Green Financial Crime*, kesuksesan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF, masifnya penguatan jejaring kerjasama dan edukasi masyarakat, kemudahan akses literasi dan Pendidikan anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, hingga keberhasilan PPATK mendapatkan nilai "sangat memuaskan" dalam hal pengawasan kearsipan, serta pelaksanaan peringatan 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia.

Selama Januari s.d. 30 Juni 2022, PPATK senantiasa menunjukkan kontribusinya dalam upaya peningkatan penerimaan negara dengan menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp3.238.210.992.689,00. Selain itu PPATK telah menghasilkan sebanyak 645 laporan, baik HA maupun HP. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas Polri (216), Direktorat Jenderal Pajak (137), Kejaksaan Agung RI (50), KPK (44), Badan Narkotika

Ivan Yustiavandana
Kepala PPATK

Nasional (15), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (13), FIU Negara lain (23) dan Lembaga lainnya (146). Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Lain atas Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan antara lain Perpajakan (140), Korupsi (136), Terorisme (102), Tipu Gelap (94), Narkotika (43), Tindak Pidana Terkait *Green Financial Crime* (8) dan Tindak Pidana lainnya (56).

Pada April 2022, PPATK bersama seluruh stakeholder APUPPT menyelenggarakan rangkaian peringatan 2 Dekade Gerakan APUPPT yang puncak acaranya dilaksanakan di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo yang menyampaikan pesan bahwa PPATK tidak boleh berpuas diri karena tantang dimasa depan semakin berat, khususnya potensi kejahatan *cyber* yang meningkat. Oleh karena itu PPATK senantiasa meningkatkan kualitas pelaporan oleh Pihak Pelapor melalui bimbingan teknis, mengingat selama tahun 2022 PPATK telah menerima 12.889.265 laporan melalui aplikasi Go AML. Selain itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT guna meningkatkan pemahaman Anti TPPU dan TPPT bagi Aparat Penegak Hukum, aktif menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi APH.

Gelaran MER menuju keanggotaan penuh *Financial Action Task Force* (FATF) yang dilaksanakan pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022 dengan hadirnya para asesor dari China, Guernsey, UAE, USA, Irlandia, Saudi Arabia, *South Africa*, dan Perancis di Indonesia terselenggara dengan baik. Segenap apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus dihaturkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang

telah membantu menyukseskan MER FATF dan menegakkan rezim APUPPT di Indonesia.

Ucapan terima kasih dan apresiasi PPATK sampaikan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, berikut seluruh instansi terkait lainnya yang ragam kontribusinya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan masyarakat yang selalu setia mendukung kerja PPATK. Tanpa dukungan besar yang selalu menyertai langkah PPATK, perjuangan PPATK tidak akan ada artinya. Ke depan, segenap capaian yang sudah ditoreh akan menjadi pelecut semangat seluruh insan PPATK untuk terus meningkatkan semangat dan kualitas kerja demi terwujudnya negara yang kita cintai, Indonesia, bebas dari segala bentuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan segala bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dengan bangga kami sampaikan Laporan Semester PPATK 2022. Semoga segenap kerja dan capaian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat ridha dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Kepala PPATK

Ivan Yustiavandana

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan <i>Core Value</i> PPATK.....	2
2. Struktur Organisasi	6
3. Strategi Nasional	8
4. Rencana Strategis	9
5. Kata Pimpinan.....	10
6. Anggaran PPATK.....	14
7. Pengembalian Kerugian negara.....	18
9. Komposisi SDM PPATK dan Reorganisasi	20
10. Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK	26
11. Peringatan Dua Dekade APUPPT	28
12. <i>Green Financial Crime</i>	48
13. <i>Mutual Evaluation Review</i>	60
14. Penghargaan dan Pencapaian 2022	62
15. Jejaring Kerjasama Yang Kuat.....	66

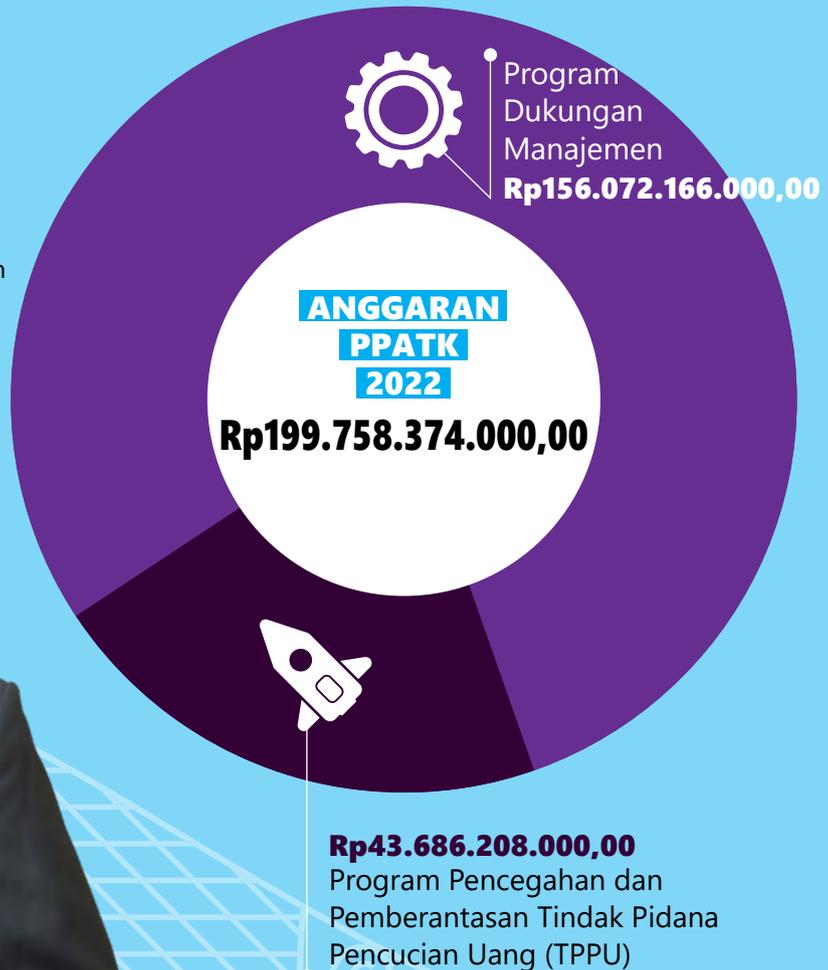
16. Pengelolaan Edukasi Masyarakat	68
17. Kemudahan Akses Literasi APUPPT.....	70
18. Pendidikan dan Pelatihan APPUPPT	72
19. Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam Memerangi Pencucian Uang.....	76
20. Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI.....	78
21. Pengawasan Kepatuhan.....	86
22. Pengawasan Sistem Keuangan Nasional	88
23. <i>Shadow Economy</i> Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi.....	90
24. PPATK <i>3rd Legal Forum</i>	92
25. Penerbitan Buku Pintar TPPU	93
26. Informasi & Analisis Dukungan Penegakan Hukum	94
27. Inovasi dalam Pemberantasan	98



ANGGARAN PPATK

“Penyerapan anggaran PPATK pada **semester 1 sudah sangat baik**. Melebihi target dari rata-rata nasional ”

M. Taufik Kurniawan
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan atau PPATK pada tahun 2022 berdasarkan DIPA PPATK nomor SP DIPA-078.01-0/2022 tanggal 17 November 2021 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 199.758.374.000,- yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp156.072.166.000,00.
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp 43.686.208.000,00.

Namun dikarenakan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia masih belum pulih pasca pandemic Covid-19, serta sebagai bentuk antisipasi jika dikemudian hari ada lonjakan kasus Covid 19, maka Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk adanya *Automatic Adjustment* atau pencadangan anggaran hal ini tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/ MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Berdasarkan surat tersebut PPATK

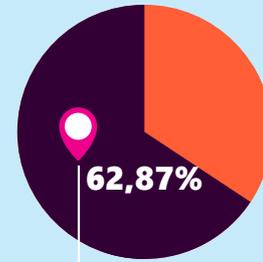
melakukan pemblokiran anggaran dengan menambahkan Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp12.032.274.000,00 dengan rincian:

- a. *Automatic Adjustment* Belanja K/L I sebesar Rp10.633.619.000,00 bersumber dari Belanja Pegawai untuk kebutuhan THR dan Gaji ke-13.
- b. *Automatic Adjustment* Belanja K/L II sebesar Rp1.398.655.000,00 bersumber dari Belanja Modal untuk pengelolaan Teknologi Informasi.

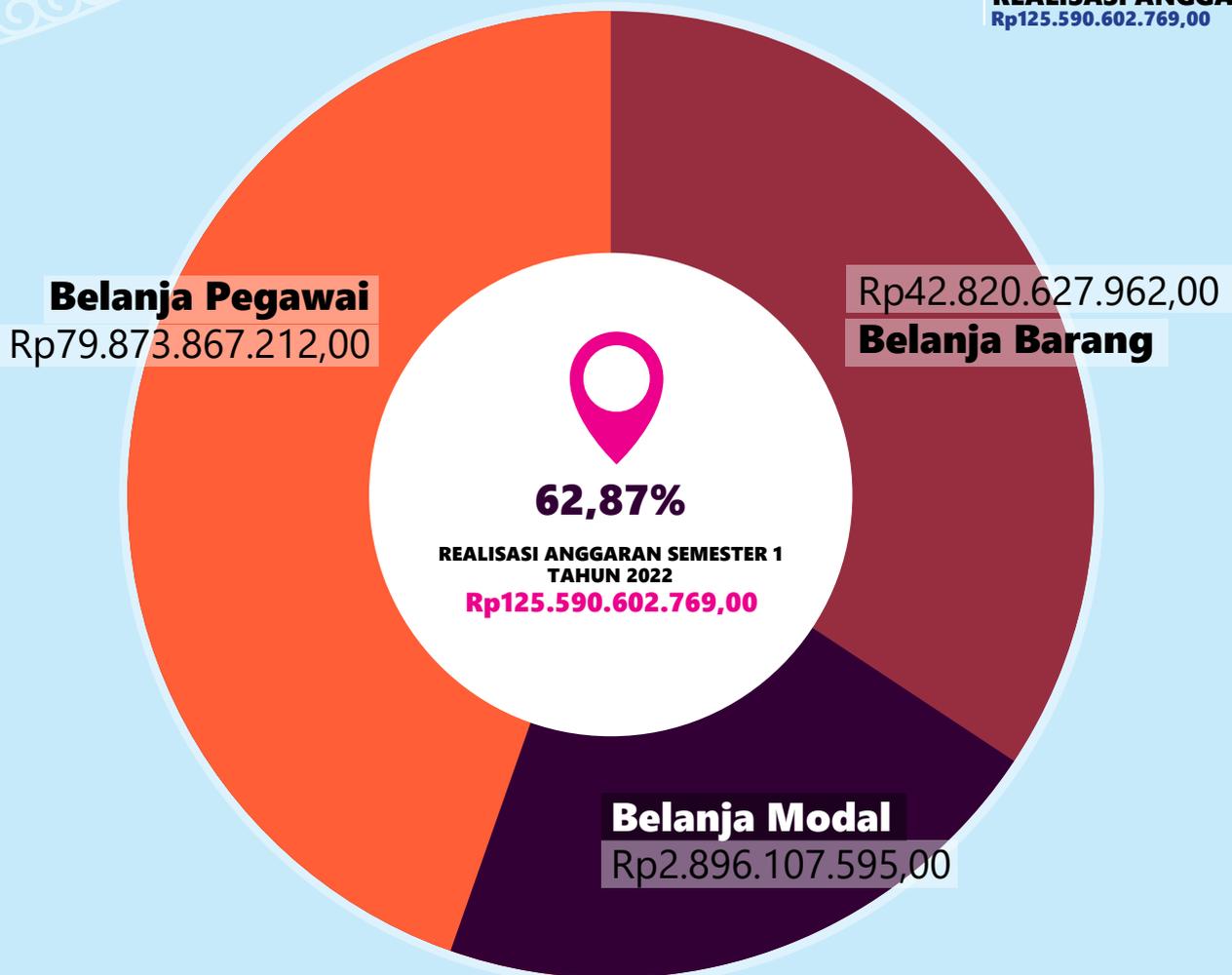
Pada periode Januari-Juni 2022, PPATK menyerap anggaran sebesar 62,87% atau sejumlah Rp125.590.602.769,00 dari total anggaran Rp199.758.374.000,00. Adapun menurut jenis belanja antara lain belanja pegawai sebesar Rp79.873.867.212,00, belanja barang sebesar Rp42.820.627.962,00 dan belanja modal Rp2.896.107.595,00. pada

REALISASI ANGGARAN

PERIODE JANUARI-JUNI 2022



REALISASI ANGGARAN
Rp125.590.602.769,00



PPATK pada semester 1 sudah sangat baik mengingat sudah melebihi target 50%.

Pada semester 1 ini, PPATK memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2021. Opini WTP ini merupakan predikat 16 kali berturut sejak tahun 2006.

Dalam hal penilaian kinerja yang dilakukan oleh Menpan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PPATK pada tahun 2021 mendapat nilai 77,80 atau BB.

TABEL REALISASI ANGGARAN

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022		SISA ANGGARAN
			s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA		199.758.374.000	125.590.602.769	62,87 %	60.953.754.231
B	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)				
E	dan Pendanaan Terorisme	43.686.208.000	24.586.678.233	56,28 %	19.099.529.767
BE.3379	Pengelolaan Bidang Hukum PPATK	1.268.821.000	297.345.423	23,43 %	971.475.577
BE.3380	Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK	5.692.323.000	1.575.577.234	27,68 %	3.661.373.766
BE.3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	25.610.952.000	19.854.510.980	77,52 %	5.756.441.014
BE.3382	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	650.000.000	289.776.327	44,58 %	360.223.673
BE.3383	Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor	670.626.000	196.412.450	29,29 %	393.755.550
BE.3384	Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	2.103.000.000	865.047.615	41,13 %	1.237.952.385
BE.5232	Pengembangan Riset TPPU	4.806.766.000	1.108.357.400	23,06 %	3.698.408.600
BE.3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	2.883.720.000	399.650.798	13,86 %	2.484.069.202
W	Program Dukungan Manajemen				
A		156.072.166.000	101.003.924.530	64,72 %	55.068.241.464
WA.3374	Pengawasan Internal PPATK	140.000.000	23.472.377	16,77 %	116.173.623
WA.3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	120.029.244.000	79.929.067.212	66,59 %	40.100.176.788
WA.3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	3.500.000.000	1.656.506.265	47,33 %	1.843.493.735
WA.3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK	32.402.922.000	19.394.878.682	59,86 %	13.008.043.318



Pengembalian Kerugian Negara

Kontribusi PPATK dalam Peningkatan Penerimaan Negara

SELAMA Januari sd 30 Juni 2022 PPATK telah menyampaikan 137 Hasil Analisis/Pemeriksaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI terkait indikasi/dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak Indonesia, baik secara proaktif maupun atas permintaan DJP. Penyampaian data/ informasi selama periode tersebut telah menghasilkan potensi penerimaan negara sebesar **Rp3.238.210.992.689,00**.

Selain itu terdapat potensi penerimaan negara dari dua Hasil Pemeriksaan PPATK yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas dua Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara dari denda sebesar Rp1 miliar, Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp10.614.418.900,00 dan SGD1.095.000 serta penyitaan aset

Obligor BLBI berupa tanah dan bangunan atas seluas total keseluruhan 89,01 Hektar dengan total nilai aset diperkirakan sekitar Rp 2 triliun.

Pajak

137 HA/HP

Terhadap Tindak Pidana bidang perpajakan

Potensi Penerimaan Negara :
Rp3.238.210.992.689,00



Putusan

2 HP

berkekuatan Hukum Tetap

Potensi Penerimaan Negara

Denda Rp1 miliar, Pengganti Kerugian Negara Rp10.614.418.900,00 & SGD 1.095.000, & Aset BLBI Rp2 triliun



Ringkasan Hasil/Informasi Analisis 2022

PERIODE Januari sd 30 Juni 2022, jumlah Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan sebanyak 645 laporan. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas Polri (216), Direktorat Jenderal Pajak (137), Kejaksaan Agung RI (50), KPK (44), Badan Narkotika Nasional (15), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (13), FIU Negara lain (23) dan Lembaga lainnya (146). Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Lain atas Hasil/Informasi Analisis dan Pemeriksaan yang dihasilkan antara lain Perpajakan (140), Korupsi (136), Terorisme (102), Tipu Gelap (94), Narkotika (43), Tindak Pidana Terkait *Green Financial Crime* (8) dan Tindak Pidana lainnya (56).

Selain itu Selama periode semester I tahun 2022, PPAK menerima dan mengirimkan informasi terkait proses *fit and proper* sebanyak 66 Informasi kesejumlah Kementerian dan Lembaga.

Ringkasan Hasil / Informasi Analisis 2022

sd 30 Juni 2022

645 Laporan Penyampaian :

POLRI
(216)

DJP
(137)

KEJAGUNG
(50)

KPK
(44)

BNN
(15)

DJBC
(13)

FIU Asing
(23)

Lembaga Lain
(146)

Rincian Indikasi :

Perpajakan
(140)

Korupsi
(136)

Terorisme
(102)

Tipu Gelap
(94)

Narkotika
(43)

GFC
(8)

TP Lain
(56)

Fit & Proper
(66)

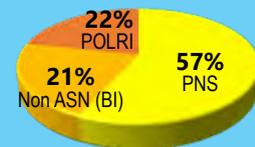


KOMPOSISI SDM PPATK

BAHWA sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat ini pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai dipekerjakan, dan Pegawai Kontrak, kemudian saat ini PPATK juga terdiri dari 2 (dua) satuan kerja, yaitu Satuan Kerja PPATK dan Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT di Depok. Adapun rincian komposisi pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :



Grafik Komposisi Pegawai PPATK



Pegawai Dipekerjakan



Tenaga Penunjang/Kontrak



Komposisi Pejabat Eselon PPATK

No.	Komponen Pegawai PPATK	TOTAL
1.	Kepala PPATK	1
2.	Pegawai Tetap (ASN) PPATK	368
3.	Pegawai Dipekerjakan	37
4.	Tenaga Penunjang/ Pegawai Kontrak	200
JUMLAH TOTAL PEGAWAI PPATK		606



REORGANISASI PPATK

LATAR BELAKANG :

Dasar dilakukan reorganisasi kelembagaan PPATK adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat **penambahan tugas PPATK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden.
- b. PPATK ditetapkan sebagai instansi yang berwenang melakukan kegiatan disrupsi pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui **penerapan *targeted financial sanction***.
- c. **Perluasan Penyidik TPPU** melalui Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi No.15 /PUUXIX/2021, yang menetapkan secara progresif terkait uji materi (*judicial review*) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), sehingga akan meningkatkan kerjasama terkait pemberantasan TPPU di Indonesia.

“**Reorganisasi PPATK berimplikasi terhadap kebutuhan** integrasi penataan SDM, proses bisnis, dan tata kelola organisasi guna keefektifan pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT”

**Albert Huppy
Woude**

Kepala Biro SDM &
Ortala



- d. Kontribusi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan melalui **penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada penyidik**, termasuk dalam penanganan kasus-kasus besar dan menarik perhatian masyarakat.
- e. PPATK bekerja sama dengan DJP dan DJBC juga terus berupaya untuk membantu meningkatkan penerimaan pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun sektor penegakan hukum, melalui pelaksanaan **kewenangan penelusuran aset oleh PPATK**.
- f. Dalam lingkup internasional, peran aktif Indonesia, khususnya PPATK ditunjukkan melalui upaya Indonesia untuk masuk dalam **keanggotaan organisasi internasional Financial Action Task Force (FATF)**.
- g. Selain pertimbangan di atas, berbagai tantangan lain juga mendesak untuk diselesaikan oleh PPATK, seperti perbaikan sistem pelaporan dan *database*, peningkatan kualitas hasil analisis dan hasil

pemeriksaan, hingga program-program prioritas lain seperti implementasi goAML, pengukuran *financial integrity review*, pembangunan aplikasi *politically exposed persons*, pembangunan aplikasi *information sharing platform*, penguatan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional, serta penguatan pelayanan terpadu Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme di lingkungan PPATK.

Dengan semakin bertambahnya tugas dan peran PPATK, membawa implikasi terhadap kebutuhan penataan organisasi PPATK. Harapan terhadap PPATK di masa yang akan datang pasti semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya akan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

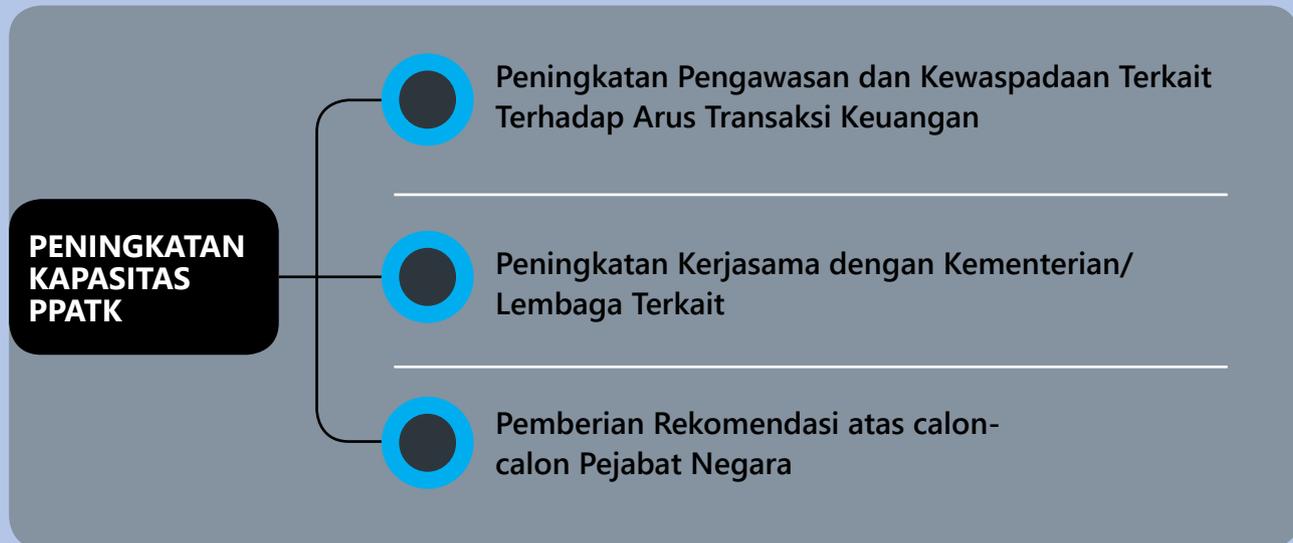
PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan kapasitas PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. upaya peningkatan pengawasan dan kewaspadaan terkait terhadap arus transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan narkoba, kejahatan finansial melalui transaksi atau alat pembayaran digital, *green financial*

crime, dan kejahatan-kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi;

- b. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan; dan
- c. pemberian rekomendasi atas calon-calon pejabat negara yang akan dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).



PELANTIKAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan PPATK. Pelantikan ini merupakan respon dari penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan PPATK.

Kepala PPATK mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dilantik pada hari ini. "Dengan reorganisasi ini, melalui pelantikan Saudara dapat mempercepat gerak roda organisasi dan siap menghadapi seluruh tantangan yang ada di depan," ucap Ivan.

Beliau menambahkan bahwa semua unit kerja memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan PPATK.

"Bekerjalah tanpa mengenal label, namun bekerjalah sesuai panggilan hati sebagai Abdi Negara," pungkasnya.

Pelantikan ini disaksikan langsung oleh seluruh pegawai PPATK baik secara tatap muka maupun secara virtual.



Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK



PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar acara Penandatanganan Pakta Integritas dan *Sharing Knowledge* Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan PPATK, Rabu, 22 Juni 2022 bertempat di Gedung PPATK. Acara ini diselenggarakan guna menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas.

Kepala PPATK memberikan arahan kepada seluruh pegawai PPATK untuk menanamkan integritas dalam diri.

"*Integrity come from home*, yang artinya integritas berasal dari diri masing-masing. Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan '*root*' dari nilai-nilai dasar PPATK. Ketika integritas telah menjadi '*root*' di setiap pegawai, maka

seharusnya pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah sesuatu yang mudah dilakukan di lingkungan PPATK" ucapnya.

Inspektur PPATK, I Nyoman Jendrika dalam sambutannya menyampaikan bahwa Inspektorat berkomitmen menjadi mitra dalam mengawal pembangunan ZI di lingkungan PPATK melalui fungsi *advisory* kami.

Selanjutnya, Koordinator Tim Penilai Intern ZI PPATK, Nelson D.P. Manalu menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi TPI mengenai Pengusulan Unit Kerja ZI yang berpredikat



WBK/WBBM di Lingkungan PPATK Tahun 2022.

"Berdasarkan hasil penilaian TPI, terdapat 4 unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan WBK/WBBM pada tahun ini yaitu Direktorat Analisis Pemeriksaan (DAP) I, DAP II, DAP III, dan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri" ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala PPATK beserta seluruh pimpinan unit kerja di Lingkungan PPATK. Pimpinan unit kerja yang diusulkan sebagai unit WBK/WBBM dalam ZI di lingkungan PPATK Tahun 2022 menyampaikan pernyataan komitmen dalam rangka pembangunan ZI.

Acara ini diakhiri dengan *sharing knowledge* oleh Kepala Pusdiklat APUPPT, Akhyar Effendi terkait pengalaman Pusdiklat APUPPT dalam membangun ZI sehingga berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2021. "Keberhasilan kami dalam membangun ZI merupakan keberhasilan bersama dan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen PPATK.", ujarnya.



Peringatan Dua Dekade APU-PPT

BERBEDA halnya dengan pelaksanaan peringatan ulang tahun PPATK yang lalu, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT ini memasuki tahun ke-20 yang perlu disyukuri, dimaknai dan dirayakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Peringatan Nasional 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia

ini mengambil tema **“20 Tahun Gerakan APUPPT: Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas dan Berkelanjutan”**. Dalam memperingati momen dimaksud, PPATK telah melakukan bermacam kegiatan, diantaranya:

1. Video 2 Dekade APUPPT Indonesia

Penyampaian testimoni dalam bentuk video singkat sesuai dengan tema kegiatan dan semangat 20 Tahun Gerakan APUPPT.

2. Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APU PPT

Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APU PPT bersama *Stakeholder* Utama APU PPT di Kantor PPATK pada kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka ikut mengkampanyekan semangat 20 Tahun Gerakan APU PPT pada tanggal 29 Maret 2022 kepada *Stakeholder* Utama dalam "Komitmen Pencanangan *Fight Against Green Fincancial Crimes*". Dalam Acara ini, diusulkan terdapat kegiatan Pemberian Penghargaan kepada PJK yang Aktif melaporkan Laporan terkait *Green Financial Crime* secara simbolis di Kantor PPATK, yang merupakan makna dari: a)

upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia akan sentiasa memberikan manfaat dan dampak positif bagi negara Republik Indonesia, b) akan selalu terdapat tunas atau upaya baru dalam memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta c) upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme akan selalu menaungi upaya Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan mencegah adanya korupsi, narkoba, dan tindak pidana asal lainnya.



3. Acara Puncak: *Presidential Lecture*, Bazar APUPPT, dan Buka Puasa Bersama

Pada acara puncak ini Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan arahan atau *presidential lecture* pada tanggal 18 April 2022 kepada seluruh *stakeholder* pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta masyarakat akan pentingnya Integritas dan Kesatuan Bangsa dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menyongsong

green economy yang bebas dari TPPU dan TPPT.

4. Giat *Public Campaign*

Public Campaign dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun 2 Dekade Rezim APUPPT di Indonesia, PPATK sebagai *focal point* terhadap pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang akan dikampanyekan melalui saluran media sosial, website milik PPATK, Videotron dan



ARAHAN PRESIDEN RI 2 DEKADE GERAKAN NASIONAL APU-PPT

”

Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan **kejahatan ekonomi seperti *cyber crime* dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi**

- Ir. H. Joko Widodo -



saluran media lain. Kegiatan *campaign* ini menyasar audiens dengan rentang usia 13-56 tahun. Dengan segmentasi Perorangan, kelompok, organisasi, dan pekerja. Adapun profesi masyarakat yang disasar berasal dari perbankan, sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, komunitas.

Peringatan ini menjadi momentum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang sudah menjadi fenomena dunia dan tantangan internasional. Kejahatan *money laundering* telah menjadi *transnational crime* karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*). Perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu negara ke negara lain menimbulkan kekhawatiran internasional karena berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian, terutama dunia bisnis, dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini juga diharapkan dapat memicu semangat seluruh *stakeholder* APU-PPT dalam menyambut upaya Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional

anti-pencucian uang, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang sangat prioritas. Dengan menjadi anggota FATF, Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menentukan standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di dunia. Pada saat ini hanya Indonesia sebagai negara anggota G-20 yang belum tergabung sebagai anggota FATF. Proses menuju keanggotaan FATF antara lain membutuhkan prasyarat keberhasilan Indonesia melalui proses penilaian kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF, yang dikenal dengan *Mutual Evaluation Review* (MER), yang telah berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2022 lalu.



Video 2 Dekade APUPPT Indonesia

Komitmen 2 Dekade PPATK, Memberantas Pencucian Uang dalam Pemilu; Edukasi untuk Memilih Pemimpin Amanah & Berintegritas

MEMASUKI usia 20 tahun (2 dekade), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) telah menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selanjutnya, tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan diperluas dengan memerangi kejahatan di bidang lingkungan atau *Green Financial Crime* (GFC).

Dalam rangka memperingati perjalanan tersebut, PPATK bersama FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) menggelar acara *Live Talk Show* dengan tema 2 Dekade APUPPT: Sinergi Membangun negeri dan Mencegah Kriminal Menguasai Negeri, di Jakarta, Selasa 22 Maret 2022. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber berkualitas dan kredibel seperti Prof. Yudi Latif Ph.D (Kepala BPIP Periode 2017–2018), Prof.





Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A (Hakim Mahkamah Konstitusi), Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. (Wakil Ketua KPK), Drs. Hadar Nafis Gumay, M.A. (Komisioner KPU Periode 2012 - 2017), dan Yunarto Wijaya, M.M. (Direktur Eksekutif Charta Politica). *Talkshow* ini akan membahas pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) dari aspek sosial politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

Dalam sambutannya Kepala PPATK menyampaikan bahwa *Talk Show* ini bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang posisi strategis pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) agar dapat berjalan dengan baik. Dalam proses itu, masyarakat dan seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama mengawal pesta demokrasi dan berhasil memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas.

"Pemilu menjadi indikator untuk menentukan terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis. Melalui Pemilu, masyarakat dapat menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu yang berkomitmen penuh mendahulukan kepentingan rakyat," ujarnya.

Kepala PPATK menegaskan rakyat perlu memilih pemimpin yang tidak mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi dan bisnis untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, justru sebaliknya, yang memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu *talk show* ini menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya integritas dan etika moral yang baik sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMITMEN PPATK

"PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan. Selain memperkuat kualitas SDM seiring dengan perkembangan teknologi digital, PPATK juga berusaha sesegera mungkin merealisasikan keanggotaan penuh Indonesia dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi positif terhadap iklim investasi dan sistem keuangan Indonesia dan memperkuat

confidence dan *trust* terhadap Indonesia dalam bisnis internasional,” tutur kepala.

Selain itu, PPATK juga fokus memerangi pencucian uang dari hasil kejahatan lingkungan (*green financial crime*). Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan *Norwegian Center for Global Analysis* (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar US\$ atau Rp1.540 triliun setiap tahun. Ivan menegaskan bahwa, komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT telah mampu mengangkat reputasi Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara maju, yang selanjutnya dapat memperkuat perekonomian nasional dan membuat masyarakat semakin sejahtera.

“Sesuai dengan tema Sinergi Membangun Negeri dan Mencegah Kriminal Menguasai Negeri, PPATK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan APUPPT tidak akan mentolerir sekecil apapun aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme di negeri ini, khususnya *green financial crime*.”

Guna memastikan keberhasilan tersebut, Ivan menambahkan, PPATK memperkuat

sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan APUPPT, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Nasional Narkotika, Kementerian Keuangan, Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) dan *stakeholder* lainnya.

“Komitmen 2 Dekade PPATK untuk semakin kuat dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia”

Rachmawati

Plt. Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri



Acara Puncak 2 Dekade Gerakan APU PPT

JAKARTA, 18 April 2022 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar diskusi (*talk show*) bertema "Menelusuri Jejak *Binary Option* dan *Robot Trading Ilegal*, Menjerat Pelaku Penipuan" untuk mengedukasi masyarakat terhadap produk investasi yang aman serta mencegah masyarakat menjadi korban penipuan produk investasi dengan *platform binary option* dan *robot trading*.

Talk show tersebut diselenggarakan dalam rangkaian peringatan 2 Dekade Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dihadiri sejumlah narasumber yang kompeten di bidang masing-masing dan diselenggarakan secara *hybrid* pada Senin, 18 April 2022. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan peluncuran perangko bertema 2 Dekade APU PPT.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menjelaskan perkembangan teknologi

digital perbankan memberikan *benefit* berupa efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam transaksi perbankan dan keuangan. Namun, teknologi digital juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang hasil investasi ilegal. Kondisi ini menjadikan modus pencucian uang (*money laundering*) menjadi lebih masif, rumit, dan semakin sulit diidentifikasi.

"Menyusul maraknya kegiatan penipuan dan investasi ilegal, khususnya melalui *platform binary option* dan *robot trading*, PPATK menginisiasi *talk show* dengan tema "Menelusuri Jejak *Binary Option* dan *Robot Trading Ilegal*, menjerat pelaku penipuan". Ini bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar dalam berinvestasi tidak tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi," ujarnya saat memberikan sambutan *talkshow* PPATK, Senin (18/4/2022).



PPATK, menurutnya, terus menelusuri aliran uang yang diduga terindikasi dengan investasi ilegal dengan menghentikan sementara transaksi dengan nilai total Rp588 miliar dengan jumlah 345 rekening.

Ivan menegaskan, modus yang digunakan oleh pelaku juga kian beragam untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil investasi ilegal tersebut. Salah satu modusnya dengan menyimpan dana tersebut dalam bentuk aset kripto, penggunaan

rekening milik orang lain, serta dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dan investasi ilegal, perlu memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan tersebut yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan legalitas perusahaan pada instansi terkait sesuai dengan kegiatan usaha. "Hal terpenting adalah diperlukan



adanya edukasi dan peningkatan literasi agar masyarakat tidak menjadi korban atas penipuan dan investasi ilegal."

Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan langkah-langkah PPATK ke depan untuk memerangi para pelaku kejahatan lingkungan yang merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan hidup. "Saya meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan seluruh pemangku kepenting-

an APUPPT dalam forum ini, untuk menutup seluruh peluang munculnya kejahatan keuangan di bidang lingkungan hidup, atau *Green Financial Crime*, dan memiliki tekad yang sama untuk secara tegas memberantas tindak kejahatan terhadap lingkungan.

ARAHAN PRESIDEN

Dalam Pertemuan Koordinasi dan Arahan Presiden RI di Peringatan Dua Dekade Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan



Terorisme (APU PPT) Indonesia: "***Fight Against Green Financial Crime***" di Istana Negara, Senin pagi (18/4/2022), Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada PPATK dan para pemangku kepentingan yang telah bekerja keras untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Apa yang telah dicapai selama 2 dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan yang akan dihadapi di masa depan semakin berat dan potensi kejahatan *cyber* semakin meningkat, muncul berbagai modus dan bentuk baru TPPU dan TPPT. Pencegahan TPPU dan TPPT tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri, kita perlu bekerja keras bersama-sama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah industri keuangan dan seluruh masyarakat untuk sinergi dan penegakan hukum berkeadilan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada investor, dan membangun

sistem keuangan lebih kuat berintegritas, dan berkelanjutan," tegas Jokowi.

Menurutnya, dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit, dan kompleks, Presiden memberikan beberapa arahan.

Pertama, perlu terus melakukan terobosan secepatnya dalam transformasi digital yang mengadopsi *regulatory technology*, terobosan hukum atas permasalahan fundamental.

Kedua, PPATK perlu meningkatkan layanan digital, *platform* pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki secara digital, lengkap, *real time*, terintegrasi, dan mampu melayani seluruh pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, dan akurat.

Ketiga, seluruh kementerian dan lembaga, PPATK sebagai *focal point* dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat yang telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional. Antisipasi sedini mungkin untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan dan antisipasi kejahatan ekonomi seperti

cybercrime dan kejahatan lainnya.

Sementara itu Kepala PPAATK menyampaikan langkah-langkah PPAATK ke depan untuk memerangi para pelaku kejahatan lingkungan (*Green Financial Crimes/GFC*) yang merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan hidup. "Saya meminta kepada PPAATK dan seluruh pemangku kepentingan APU PPT dalam forum ini, untuk menutup seluruh

peluang munculnya kejahatan keuangan di bidang lingkungan hidup, atau ***Green Financial Crime***, dan memiliki tekad yang sama untuk secara tegas memberantas tindak kejahatan terhadap lingkungan," tegas Kepala PPAATK.

Hadir sebagai narasumber dalam *Talkshow Menelusuri Jejak Binary Option*



dan *Robot Trading Illegal, Menjerat Pelaku Penipuan*” adalah Tongam Lumban Tobing (Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK/Ketua Satgas Waspada Investasi), Aldison, S.H. (Kabiro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti), Yudhi Wibisana, (Wakil Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah),

Jeth Soetoyo (*Founder* dan CEO PT Pintu), Kumpul Aditya Cahya S, S.Kom (Kanit V Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) dan Oscar Adam Darmawan (Pendiri PT. Indodax Nasional Indonesia) serta Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum UI) hadir secara *online*.



2 DEKADE GERAKAN PEMBERANTASAN TPPU :

Dukung Transformasi Ekonomi Hijau, PPATK Fokus Berantas *Green Financial Crimes*

PERKEMBANGAN teknologi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dan kemudian menyembunyikan termasuk mencuci uang hasil kejahatan itu. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bahkan pemerintah melalui aparat penegak hukum bertindak tegas kepada pelaku kejahatan berkedok investasi ilegal yang merugikan dan merusak kepercayaan publik. Hal itu disampaikan Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2 Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2002 – 2022, di Gedung

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Kegiatan dengan tema Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas dan Berkelanjutan ini merupakan kerja sama PPATK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan APUPPT. “Pelaku kejahatan penipuan berkedok investasi ilegal sangat merugikan, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya perbaikan iklim investasi. Pemerintah bertindak tegas terhadap tindak kejahatan itu agar tidak ada lagi anggota masyarakat yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi,” ujarnya saat memberikan sambutan Silatnas 2 Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2002 – 2022.



♦ Kutipan ♦

2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia



“

Dalam perjalanan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), modus tindak pidana, modus pencucian uang, dan modus pendanaan terorisme, selalu dinamis memanfaatkan celah-celah pada regulasi sektor keuangan dan literasi keuangan masyarakat, khususnya ditengah digitalisasi sektor keuangan sebagai dampak perkembangan teknologi.

”

IVAN YUSTIAVANDANA

(Kepala PPAATK)

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian 2 dekade gerakan APUPPT di Indonesia. "Saya mengapresiasi PPATK atas peran aktif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku *focal point* dalam penguatan dan peningkatan Gerakan APUPPT sekaligus peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan APUPPT di Indonesia. Saya berharap sinergi dan kolaborasi antara PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan," ujarnya. Dia berharap pada momentum yang bertepatan dengan 2 dekade Gerakan APUPPT Indonesia, seluruh komponen bangsa merapatkan barisan, memperkuat komitmen dan semangat kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam sambutannya menyebutkan kejahatan lingkungan atau *green financial crimes* yang merugikan dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu program 2 dekade Gerakan APUPPT

ke depannya. Aktivitas pencucian uang dari kejahatan lingkungan yang bernilai sangat besar telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan dunia internasional, karena merusak tatanan dunia dan mengancam keberlangsungan lingkungan.

"Bapak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap *green economy* yang sejalan dengan perhatian global. Peran PPATK adalah berupaya memastikan bahwa integritas sistem keuangan Indonesia tidak dikotori oleh aliran uang hasil tindak pidana yang berasal dari lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, PPATK juga mencanangkan pencegahan dan pemberantasan TPPU yang berhubungan dengan *Green Financial Crimes* sebagai upaya PPATK mendukung program pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," tutur Ivan.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebut bahwa kejahatan lingkungan mencakup berbagai kegiatan mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan hingga perdagangan limbah secara ilegal. Berdasarkan hasil riset FATF yang dirilis Juli

“ **Green Financial Crime** merupakan momentum PPATK pada 2 dekade Gerakan APUPPT dalam menyambut perhatian khusus pemerintah terhadap *green economy* ”

Maryanto

Plt. Deputy Strategi dan Kerjasama



2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia

“ Penghargaan tinggi kepada PPATK dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras selama 2 dekade untuk efektivitas pencegahan TPPU & TPPT. Apa yang telah dicapai selama 2 Dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri karena tantangan di masa depan semakin berat. Potensi kejahatan cyber semakin meningkat, muncul berbagai modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. “

Mr. H. Joko Widodo
(Presiden Indonesia)



2021, dari data INTERPOL dan *Norwegian Center for Global Analysis* (RHIPTO), nilai kejahatan lingkungan mencapai US\$110 miliar – US\$281 miliar atau Rp1.540 triliun setiap tahun keuntungan yang diperoleh para pelaku kejahatan lingkungan.

Ivan Yustiavandana menambahkan, Silatnas 2 Dekade Gerakan APU PPT merupakan peringatan *milestone* di Indonesia, yang telah menjadi bagian dari gerakan global pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk memelihara integritas sistem keuangan internasional. “Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan, *milestone* lainnya berupa penambahan pemangku kepentingan Gerakan APU PPT. Awalnya, kewajiban Penyedia Jasa Keuangan hanya pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan

Tunai (LTKT). Kini berkembang menjadi Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, dan Profesi, termasuk di dalamnya perusahaan fintech. Kewajiban pelaporan juga bertambah menjadi LTKM, LTKT, Laporan Transaksi Keuangan luar Negeri (LTKL), *cross border cash carrying* (CBCC), Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa, hingga Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan



Green Financial Crime

PADA Januari sd 30 Juni 2022, Kedeputan Anlisis dan Pemeriksaan PPATK telah menyampaikan 8 hasil analisis dan informasi kepada penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup.

Adapun pengungkapan perkara selama periode semester 1 tahun 2022 terkait 2 Hasil Analisis terkait dengan dengan perolehan tindak pidana (*proceed of crime*) dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa ijin, 3 hasil analisis terkait pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dan 1 hasil analisis terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan negara tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan.

“PPATK telah menyampaikan 8 HA dan informasi kepada penegak hukum terkait **tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup**”

Danang Tri Hartono
Direktur Analisis dan Pemeriksaan II

Praktik Green Financial Crime

Green Financial Crime juga kerap disebut dengan tindak kejahatan lingkungan. Terdapat beberapa contoh tindak kejahatan lingkungan yang kerap terjadi di sekitar kita.





Cegah dan Berantas Uang Haram dari Kejahatan Lingkungan

PPATK dan pemangku kepentingan APU PPT sepakat memerangi kejahatan di bidang lingkungan (*green financial crimes*) demi kemajuan bangsa dan negara.

Para pelaku kejahatan lingkungan yang kemudian mencuci harta hasil kejahatan dengan beragam bentuk tidak akan diberikan ruang sedikit pun untuk mengembangkan aksi mereka secara masif di Indonesia.

Gaungkan Komitmen Cegah dan Berantas *Green Financial Crime* dengan Tanam Mangrove

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pemerintah Provinsi Bali, melakukan penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Banjar Tegal, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 15 Maret 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari 2 Dekade Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia

pada tahun 2022 ini. Kegiatan ini juga sejalan mendukung perhatian masyarakat Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Terselenggaranya program penanaman pohon ini merupakan suatu bentuk kepedulian segenap *stakeholder* dalam mendukung penerapan *sustainable finance* dan *green economy* di Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali turut menyampaikan apresiasi serta dukungannya kepada PPATK yang turut memperhatikan kelestarian alam dengan wewenang yang dimiliki.

Dirinya juga berharap adanya peran penting para Tetua adat dan masyarakat setempat di sekitar pantai, untuk ikut mengawasi dan memelihara tanaman yang akan ditanam, serta turut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.



Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Indonesia telah memulai Gerakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal. Pada tahun 2022

ini, Gerakan tersebut telah memasuki usia 20 tahun atau 2 Dekade. Untuk memperingati usia Gerakan 2 Dekade APUPPT Indonesia, tema yang dipilih adalah "Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas, dan Berkelanjutan".

JAGA TERUMBU KARANG KITA

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan PT Pegadaian melakukan transplantasi terumbu karang di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 23 Juni 2022. Penanaman yang dilakukan secara simbolik ini merupakan rangkaian dari peringatan 2 Dekade Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia.

Penanaman terumbu karang merupakan salah satu kepedulian PPATK dan PT Pegadaian untuk turut melestarikan lingkungan dan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang terkait kejahatan lingkungan hidup atau yang disebut dengan *Green Financial Crimes* (GFC).

Direktur Strategi Kerja Sama Internasional PPATK, Tuti Wahyuningsih mengatakan bahwa saat ini *Green Financial Crimes* semakin menjadi perhatian karena kejahatan di bidang Kehutanan dan lingkungan hidup tumbuh jauh lebih pesat dari pertumbuhan

ekonomi global. "Data dari *Financial Action Task Force* (FATF) kerugian yang diakibatkan dari kejahatan ini mencapai lebih dari Rp1.540 triliun per tahun" ungkap Tuti

Sebagai mitra kerja PPATK, PT Pegadaian diharapkan mampu bekerja sama dalam menyampaikan adanya laporan transaksi mencurigakan khususnya terkait tindak pidana *Green Financial Crime* ini. "Kami mengapresiasi semangat dan komitmen PT Pegadaian selama ini dan semoga kerja sama ini dapat terus berlangsung" harap Tuti.

Dalam Kegiatan tersebut *Senior Executive Vice President* Manajemen Resiko PT Pegadaian, Eko Susetyo mengatakan bahwa PT Pegadaian siap memerangi *Green Financial Crime* sebagai bentuk komitmen kuat PT Pegadaian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. "PT Pegadaian siap dukung PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang" jelas Eko.



Transplantasi TERUMBU KARANG

PPATK x PEGADAIAN



Tanam Pohon, Selamatkan Alam, **SELAMATKAN INDONESIA**



KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana melakukan penanaman pohon bersama dengan Bupati Cianjur yang diwakili oleh Arif Purnawan, Asisten Daerah Bidang

Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Akhmad Nahrowi Mukhlis, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Ricky Tomi, seluruh Pejabat Struktural PPATK, perwakilan dari Forum Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dan

perwakilan pihak pelapor serta undangan lainnya di Ciloto, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Penanaman pohon ini dilakukan pada dua puluh lokasi di Indonesia, salah satu lokasinya ada di Ciloto, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan dua dekade Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, "Gerakan penanaman berbagai jenis pohon ini selain menandai dua puluh tahun berkiprahnya rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme juga untuk ikut bersama sama seluruh *stakeholder* yang ada menyukseskan program menanam Satu Juta Pohon yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo" ungkap Ivan.

Tuti Wahyuningsih, Ketua Panitia ulang tahun dua dekade rezim APU PPT yang juga Plt Deputi Pemberantasan PPATK dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa penanaman pohon yang mengambil tema

"Jaga Alam Jaga Indonesia" merupakan bagian dari upaya bersama agar alam tetap lestari, untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pimpinan PPATK dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Cianjur menanam berbagai pohon, diantaranya Flamboyan (*Delonix regia*) atau pohon Semarak Api. Tanaman ini merupakan pohon besar, dengan bunga-bunga merah cerah. Flamboyan memiliki nama genus *Delonix* yang berasal dari kata Yunani *delos* (artinya mencolok), dan *onyx*, berarti cakar. Nama ini mengacu pada penampilan bunga yang memang mencolok dan bentuk mahkota bunganya mengembang seperti cakar. Pohon ini umumnya dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, selain dijadikan sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman lindung. Saat ini Flamboyan salah satu jenis tanaman yang terancam punah karena habitat aslinya yang terganggu.



PENANAMAN 5000 POHON TABEBUYA

“Dalam Rangka 2 Dekade Gerakan Nasional APU PPT Indonesia”

 Jum'at, 3 Juni 2022

 Lombok Barat, Indonesia



GERAKAN APU PPT

PENANAMAN BIBIT MANGROVE 5000



Kawasan Ekowisata
Mangrove PIK



Juli
2022

G20 INDONESIA
2022

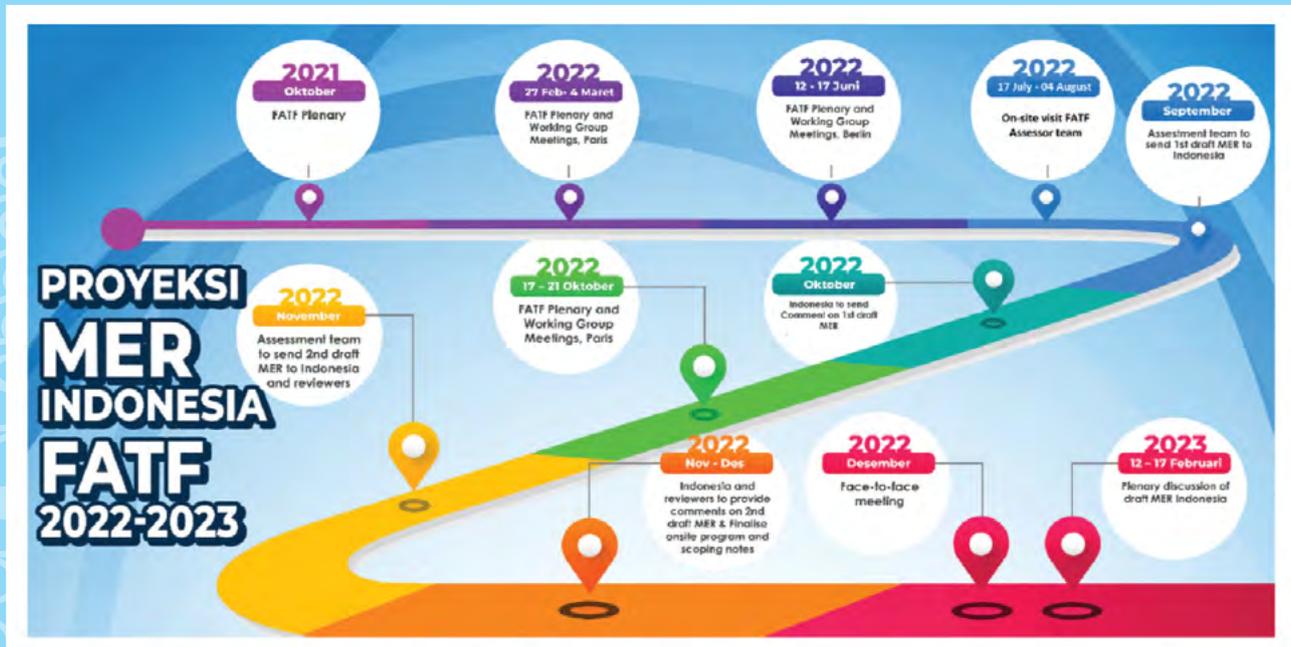




Mutual Evaluation Review FATF

INDONESIA akan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka menuju keanggotaan Indonesia di *Financial Action Task Force* (FATF). MER adalah serangkaian kegiatan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) suatu yurisdiksi/negara dapat

tercapai dengan baik terhadap Rekomendasi FATF. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Evaluator/Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota yang ditunjuk sesuai spesifikasinya di sektor hukum (pidana & internasional), keuangan, penegakan hukum dan/atau perbankan.



Adapun urgensi dari pelaksanaan MER FATF ini dapat menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU-PPT. Apabila dari hasil MER tersebut Indonesia mendapatkan nilai yang baik sesuai kriteria yang telah ditentukan, maka Indonesia akan menjadi anggota FATF. Apabila Indonesia memperoleh nilai yang buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan dapat berpengaruh pada citra Indonesia di tingkat internasional dan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU telah terlibat dalam mengoordinasikan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam persiapan *on-site visit* MER FATF Indonesia. Secara umum, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 80 *focus group discussion*, *coaching*, dan *mock-up interview* bersama pihak pemangku kepentingan terkait sejak tahun 2019. Rangkaian persiapan

ini untuk memperkuat komitmen dan memberikan simulasi secara spesifik terkait pelaksanaan *on-site visit* sehingga Indonesia dapat memberikan hasil yang maksimal dan diterima menjadi anggota penuh FATF.

“ Sebagai Negara anggota G20, Indonesia adalah satu-satunya **negara yang belum menjadi anggota FATF** ”

Tuti Wahyuningsih
Direktur Strategi dan Kerjasama Internasional





PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN 2022

ANUGERAH KEARSIPAN KATEGORI NILAI HASIL **PENGAWASAN KEARSIPAN TERBAIK**

PADA Tanggal 18 Mei 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberikan penghargaan anugerah kearsipan pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 tahun 2022. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 yang tertuang dalam Keputusan



Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 104 Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapatkan nilai **90,17 (AA “Sangat Memuaskan”)** dengan kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Dan Lembaga non-struktural.

Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2021 terdiri dari 34 Kementerian, 27 LPNK dan 31 Lembaga Tinggi Negara/

Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik, 34 Pemerintah Provinsi dan yang dilakukan oleh Provinsi terhadap Kabupaten/ Kota sebanyak 364 kab/kota.

“PPATK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan kearsipan internal **untuk memelihara memori kolektif bangsa”**

Muhammad Novian
Kepala Biro Umum



PUSDIKLAT APUPPT MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SANGAT BAIK

PUSDIKLAT APU PPT menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai "Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021"

Hal tersebut merupakan buah dari upaya peningkatan pelayanan publik dari sektor pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat APUPPT sejak akhir tahun 2017. Beberapa aspek perubahan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi *stakeholder* Pusdiklat APU PPT seperti pendaftaran terpadu, layanan bantuan, layanan pengaduan, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dan peremajaan gedung Pusdiklat APUPPT.

Dengan penghargaan tersebut menjadi salah satu kontribusi nyata Pusdiklat APUPPT dalam mewujudkan visi dan misi presiden yaitu Indonesia Maju. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* yang selalu mendukung dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas Pusdiklat APUPPT.



ENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TEGORI SANGAT BAIK LINGKUP ENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Mahkamah Konstitusi

PUSAT JASA INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN NASKAH NUSANTARA

Perpustakaan Nasional

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

Jejaring Kerjasama Yang Kuat

KEBERADAAN rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, merupakan kebutuhan riil di dalam membantu stabilitas pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Rezim ini akan dapat berjalan secara efektif bilamana seluruh elemen dan komponen yang ada di masyarakat bersama-sama bahu membahu dalam membangun dan mengembangkannya.

“**Kemitraan PPATK** diharapkan dapat meresonansikan gerakan APUPPT di masyarakat”

Supriadi
Kepala Pusat Pemberdayaan
Kemitraan APUPPT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam membangun rezim anti pencucian-uang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Sebagaimana arahan Bapak Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pengaruh PPATK merupakan vibrasi gaungan APUPPT di Indonesia. Vibrasi tersebut akan menggetarkan banyak pihak secara personal maupun organisasi agar rezim APUPPT di Indonesia dapat terus berjalan dan bergerak maju.

Atas dasar pihak personal dan organisasi, Jejaring kerjasama yang kuat merupakan modal dasar bentuk vibrasi tersebut. Jaringan Kemitraan yang kuat dalam rangka kerjasama dan koordinasi serta “memberikan vibrasi” melalui audiensi Pemberdayaan Kemitraan pada saat ini dan di masa depan diharapkan akan memunculkan MITRA-PPATK yang menjadi kepanjangan tangan dan bersama-sama dengan PPATK terus berjuang dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.



Sepanjang semester 1 tahun 2022 telah dibangun jejaring kerjasama melalui penandatanganan 5 MOU dan 2 kali pertemuan Audiensi.



Pengelolaan Edukasi Masyarakat

BENTUK pencegahan TPPU di masyarakat salah satunya melalui pengelolaan pengetahuan dan sosialisasi edukasi ke masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi PPATK ke masyarakat dilakukan melalui beberapa program seperti : Bincang santai, Podcast Jumatan, Kunjungan Mahasiswa, PPATK Mengajar, seminar/webinar, Lomba Debat, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dll.

WEBINAR:
Forum Milenial Madjoe

Mau Tajir Instan?

Hati-Hati Kena Pencucian Uang!

PEMBICARA
Jeth Sutoyo
Founder & CEO
Pintu

HOST
Ira Koesno
Director
IraKoesnoCommunications

PEMBICARA
Ivan Yustiavandana
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan

SABTU
23 April 2022
13.00 - 15.00 WIB

Registrasi Peserta
bit.ly/RegistrasiWebinar3-MADJJOE
18 - 35 tahun | Terbatas untuk 150 orang

G20
INDONESIA
2022

PODCAST

JUMATAN

KOMBES. POL. ROBERTUS YOHANES DE DEO
KASUBDIT II DITPENCEKUS BARASARI POLRI

"MODUS INVESTASI BODONG, ENDORSE ARTIS DEMI DAPATKAN KORBAN BARU"

29/2022
APRIL | PUKUL
10.00 WIB

Tute Widyawati

BINTJAY

Bintang santai

Jumat, 22 April 2022

"Menjual Nama Besar untuk Menarik Investor Baru"

Pukul : 10.00 WIB





20 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PODCAST JUMATAN
JUMPA PPATK PEKANAN

BANG FIU HOST

2022 JUMAT 25 MAR
10.00 WIB

GAIB MARUTO SIGIT
Pemimpin Redaksi Trijaya Network

"PPATK POWERFUL TAPI MEMILIKI BATASAN, MENGAPA?"

▶ PPATK Indonesia

f PPATKRI | www.ppatk.go.id | ppatk_indonesia | ppatk_indonesia | PPATK | 021-50928484

20 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN **G20 INDONESIA**

2 DEKADE GERAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PENUNJANG PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN KARYA TULIS ILMIAH

PPATK mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah berpartisipasi mengirimkan Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Kompetisi Debat Mahasiswa se-Indonesia 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia.

f PPATKRI | www.ppatk.go.id | ppatk_indonesia | ppatk_indonesia | PPATK | 021-50928484



20 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN **G20 INDONESIA**

2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia

BABAK FINAL

BABAK PENENTUAN JUARA III

KOMPETISI DEBAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME ANTARA PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2022

Kamis, 24 Maret 2022
Pukul : 08.30 WIB - Selesai

Link Zoommeeting : <https://bit.ly/DEBATAPUPPT2022>
Link Youtube : <https://youtube.com/c/PPATKIndonesia>

Live Debate Competition

TIM INQUIRY, TIM FIU, TIM STR, TIM CBCC



Kemudahan Akses Literasi APUPPT

LITERASI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) adalah salah satu bagian dari bentuk edukasi masyarakat dalam rangka pencegahan pencucian uang di masyarakat melalui literasi.

Perpustakaan PPATK mengukung literasi APUPPT ini melalui layanannya baik dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional terotomasi maupun layanan perpustakaan digital. Kini akses literasi APUPPT dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui **PPATK DIGIPUS (Perpustakaan Digital PPATK)** yang dapat diakses melalui *smartphone* baik yang ber-*platform* Android maupun IOS.

Katalog online Perpustakaan PPATK juga telah tersedia dalam bentuk **online public access catalogue - OPAC** yang dapat di akses melalui **perpustakaan.ppatk.go.id**.

STATISTIK KOLEKSI PERPUSTAKAAN PPATK

KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN	1.674	Judul
	3.616	Eksemplar
KOLEKSI DIGITAL PPATK DIGIPUS	3.501	Judul





Baca Koleksi
Buku dan Langganan Media Digital melalui
Perpustakaan Digital PPATK

P.P.A.T.K
digipus

Scan QR Code di bawah, untuk
Install Aplikasi

Android



iOS



Informasi & Pertanyaan:
perpustakaan@ppatk.go.id



Cari Browse

Kata Kunci

Judul

Samus Bahan

Cari

Perincian Isi - Riwayat Pencarian - Bantuan

KOLEKSI UNGGULAN



Financial Investigation and Forensic Accounting (Third Edition) / George A. Manning, PhD, CFE, EA



Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation / Babak Akhgar, P. Sakine



The end of money: story of Bitcoin, cryptocurrencies and the blockchain revolution / New scientist



The Art of Intelligence: Lessons from a Life in the CIA's Clandestine Service / Meloy A. Crumpton



Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

MELALUI Pusdiklat APU PPT, PPATK menggendong program Prioritas Nasional sejumlah 12 penyelenggaraan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 360 peserta.

Penyelenggaraan Pelatihan pada periode semester satu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Stakeholder	Jml	Peserta
1	Internal PPATK	1	36
2	Apgakum	8	246
3	Pelapor	10	413
4	LPP	1	38
Total		20	733

Selain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat APU PPT juga menyelenggarakan seminar APU PPT dalam upaya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam rezim APUPPT, berikut merupakan penyelenggaraan seminar di Pusdiklat APU PPT yang telah diselenggarakan pada tahun 2022:

No	Seminar/ Webinar	Penyelenggaraan	Target	Jumlah Peserta
1	<i>Big Data Analytics for Money Laundering Detection</i>	3 Februari 2022	Internal PPATK, Apgakum, LPP dan Pihak Pelapor	821
2	Tantangan Kompetensi Penyidik TPPU di Era Ekonomi Digital	24 Mei 2022	Internal PPATK, Bagian SDM PPNS dan Penyidik TPPU	455
3	Seminar Indonesia Merdeka Tanpa Pencucian Uang	31 Agustus 2022	Instansi pemerintah, pegiat usaha dan masyarakat sekitar Pusdiklat APU PPT	80
Total				1357

PRESTASI PUSDIKLAT APUPPT

No	Penghargaan	Pemberi	Keterangan
1	Akreditasi Penyelenggara Pelatihan	Lembaga Administrasi Negara	Penilaian atas penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN pada tahun 2021 dengan nilai 85,275 (Akreditasi Bintang 1)
2	Zona Integritas	Kemenpan RB	Predikat WBK (wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021
3	Pengelolaan Arsip	PPATK	Pusdiklat APU PPT sebagai unit pengelola arsip terbaik pada tahun 2021
4	Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Penghargaan sebagai unit pelayanan publik dengan predikat SANGAT BAIK tahun 2021
5	Predikat WTP	BPK	Mendukung proses penilaian opini terhadap laporan keuangan PPATK yaitu WTP 15 kali melalui pengelolaan keuangan yang baik

“ Akreditasi penyelenggara pelatihan dan Zona Integritas Pusdiklat diharapkan menjadikannya kampus FIU yang profesional dan terpercaya ”

Akhyar Effendi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pada tahun 2022 telah meluncurkan pembaruan pada situs web Pusdiklat APUPPT di alamat **<https://ifii.ppatk.go.id>**. Situs web baru tersebut menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan Pusdiklat APUPPT dan juga informasi mengenai program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT.

Selain itu Pusdiklat APUPPT juga meluncurkan aplikasi *Learning Management System* dengan *branding* IFII Learning di alamat **<https://ifiilearning.ppatk.go.id>**. Aplikasi IFII Learning dimanfaatkan oleh Pusdiklat APUPPT untuk mengelola kegiatan pelatihan mulai dari registrasi pelatihan, pelaksanaan pelatihan (*pre test*, distribusi materi dan media pembelajaran, *post test*) hingga penerbitan sertifikat pelatihan dilakukan.

Dengan dukungan aplikasi IFII *Learning* ini, Pusdiklat APUPPT juga mulai menyelenggarakan pelatihan *blended learning* yang ditujukan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Pelatihan *blended learning* merupakan pelatihan yang mengkombinasikan proses belajar mandiri melalui aplikasi IFII *Learning* dengan media pembelajaran seperti modul, video dan multimedia interaktif, yang dilanjutkan dengan tatap muka secara virtual untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang telah dipelajari secara mandiri. Model pembelajaran ini ke depannya diharapkan akan semakin banyak dilaksanakan agar jangkauan pelatihan Pusdiklat APUPPT dapat semakin luas.

Ke depan, konten pembelajaran dalam aplikasi IFII *Learning* akan terus dikembangkan sehingga aplikasi tersebut dapat menjadi media pembelajaran APUPPT yang komprehensif.



ALUR PENDAFTARAN PELATIHAN



Statistic

Course Categories



Pihak Pelapor



Aparat Penegak Hukum (APGAKUM)



Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)



Internal PPKATK



Webinar dan Seminar



PNBP

[View All Courses](#)



Pemanfaatan *Big Data* dalam Memerangi Pencucian Uang

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelenggarakan acara Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) APUPPT yang bertajuk "*Using Big Data Analytics For Money Laundering Detection*", pada 10 Februari 2022 di Gedung Pusdiklat APUPPT, Kota Depok. Seminar dilakukan secara daring dan tatap muka dengan peserta dari pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan internal PPATK.

Big data analytics memungkinkan untuk memproses dan menganalisis data nonlinear dalam volume besar dan mengidentifikasi pola tertentu yang tersembunyi serta menghubungkan data yang tampak tidak saling berkaitan. "*Big data analytics* tidak hanya digunakan untuk pengungkapan suatu kejahatan namun juga dapat memprediksi suatu kejadian melalui pemrosesan data dalam volume besar baik data linier maupun

nonlinier dari sumber yang berbeda-beda sehingga dapat mendeteksi anomali secara cepat.

Bagi PPATK dan penegak hukum, *big data tools* dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan visualisasi sehingga dapat menyediakan gambaran lebih utuh mengenai aliran dana ilegal serta mengidentifikasi area geografi, industri, *channel* dan para pihak yang diduga terlibat suatu kejahatan.

PPATK saat ini sudah tidak dapat bekerja secara sederhana. Di era teknologi 4.0 dan era 5.0 *Money Laundering*, sudah bukan waktunya lagi bekerja berdasarkan *textbook*, namun harus bisa *out of the box*. Untuk itu perlu kesamaan tujuan serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam Rezim APUPPT untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah basis data yang terangkai menjadi informasi berharga guna menghalau berbagai kejahatan ekonomi.

PENTINGNYA PEMANFAATAN BIG DATA DALAM MEMERANGI PENCUCIAN UANG

KEPALA PPAK MENGATAKAN LUASNYA PELUANG UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI DIGITAL MELALUI BERBAGAI SARANA PEMBAYARAN ELEKTRONIS TELAH MENGHASILKAN EKOSISTEM YANG SANGAT KOMPLEKS DAN SEMAKIN MENYULITKAN DALAM MENGIDENTIFIKASI MAUPUN MENELUSURI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, SEHINGGA MEMICU TINGGINYA VOLUME DATA TRANSAKSI SEHINGGA PEMANTAUAN POLA TRANSAKSI MENCURIGAKAN AKAN SULIT DIDETEKSI JIKA HANYA MEGANDALKAN TRADITIONAL TOOLS.

BIG DATA

PENGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG MERUPAKAN TANTANGAN YANG PERLU DISIKAPI SEGERA OLEH SELURUH PIHAK, SALAH SATUNYA ADALAH DENGAN MENGGUNAKAN BIG DATA ANALYTICS,

IVAN YUSTIAVANDANA
KEPALA PPAK

BAGI PPAK DAN PENEGAK HUKUM, BIG DATA TOOLS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PEMETAAN DAN VISUALISASI SEHINGGA DAPAT MENYEDIAKAN GAMBARAN LEBIH UTH MENGENAI ALIRAN DANA ILLEGAL SERTA MENGIDENTIFIKASI AREA GEOGRAFI, INDUSTRI, CHANNEL DAN PARA PIHAK YANG DIDUGA TERLIBAT SUATU KEJAHATAN.



Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI

BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PIHAK PELAPOR

PPATK bersinergi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta Asosiasi Pihak Pelapor melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pihak Pelapor guna mendorong

program percepatan registrasi pada aplikasi goAML sebagai sarana pelaporan kepada PPATK. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

No.	Tanggal	Jenis Pihak Pelapor	Jumlah Peserta
1	11 Maret 2022	Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	75 Koperasi
2	22 Maret 2022	Penyelenggara <i>Financial Technology</i> (Fintech)	50 Perusahaan
3	14 April 2022	Pedagang Kendaraan Bermotor	272 Perusahaan
4	21 April 2022	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	45 Perusahaan
5	30 Mei 2022	Perusahaan Properti/Agen Properti	59 Perusahaan
6	7 Juni 2022	Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/ Transfer Dana, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	46 Perusahaan

Uang, kualitas laporan Pihak Pelapor merupakan ikhtiar yang mendasar, sehingga melalui Bimbingan Teknis pada tahun 2022 Pihak Pelapor diperkaya dengan materi-materi Tata Cara Registrasi Aplikasi goAML, Tata Cara Pengkinian Data Aplikasi goAML, serta Tata Cara Penyampaian Laporan Melalui Aplikasi goAML.

Adapun rangkaian kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan pada Semester 1 Tahun 2022 oleh PPATK bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah sebagai berikut :

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan kepada berbagai Pihak Pelapor, diharapkan *awareness* atas urgensi mitigasi resiko pencucian uang semakin meningkat, sehingga celah dan ruang kejahatan khususnya di sektor Koperasi Simpan Pinjam, Fintech, Pedagang Kendaraan Bermotor, Perdagangan Berjangka Komoditi, Pedagang Valuta Asing/KUPVA, penyelenggara transfer dana, serta BPR semakin sempit. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan negara yang bersih dari pencucian uang akan terwujud dan membuahkan kesejahteraan untuk semua insan bangsa.

“ Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, **kualitas laporan Pihak Pelapor** merupakan faktor yang mendasar ”

Aris Priatno
Direktur Pelaporan



RAPAT KOORDINASI TAHUNAN REZIM APU PPT TAHUN 2022

PPATK melaksanakan rapat koordinasi tahunan bersama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh sekurangnya 457 pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Pihak Pelapor, dan Asosiasi Pihak Pelapor secara *hybrid*, baik melalui media daring maupun hadir fisik (*luring*) pada Auditorium Yunus Husein, Gedung PPATK. Pertemuan yang rutin dilakukan setiap tahun ini bertujuan sebagai wadah koordinasi dan diskusi 2

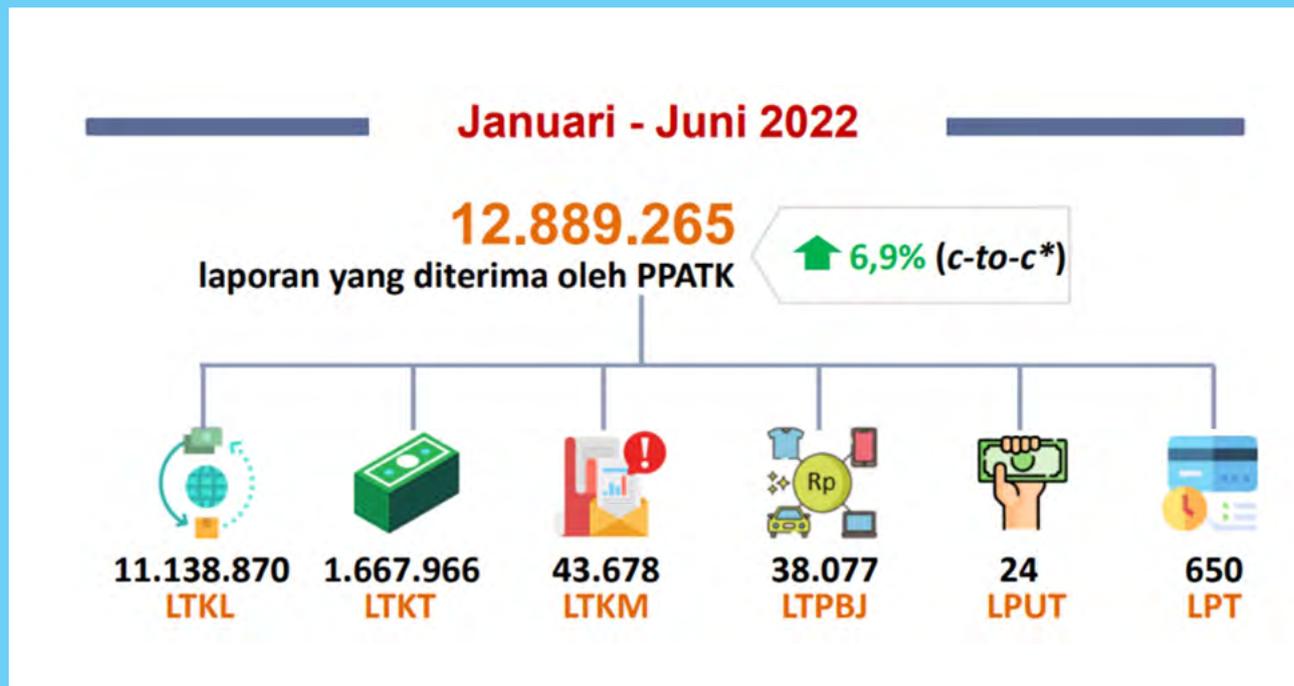


(dua) arah rezim APU PPT. Agenda Rapat Koordinasi Tahun 2022 mencakup identifikasi arah dan kebijakan rezim APU PPT, tren modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di era digital, dan hasil evaluasi kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor selama Tahun 2021 melalui aplikasi goAML untuk optimalisasi implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PPATK juga menyampaikan rangkaian prestasi bersama yang telah dicapai pada Tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI SEMESTER I TAHUN 2022

Selama periode Januari s.d. Juni 2022, PPATK mencatat total laporan yang disampaikan pihak pelapor melalui kepada PPATK sistem aplikasi GoAML sebanyak 12.889.265 laporan. Jumlah ini meningkat sebesar 6,9% dibandingkan periode Januari s.d. Juni tahun 2021. Adapun dilihat dari jenis laporan, jumlah laporan yang diterima PPATK terdiri dari 11.138.870 laporan transaksi

keuangan transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL), 1.667.966 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), 43.678 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), 38.077 laporan transaksi penyedia barang dan jasa (LTPBJ), 24 laporan pembawaan uang tunai (LPUT), dan 650 laporan penundaan transaksi (LPT).



* Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan-Juli 2022 terhadap Jan-Juli 2021

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME (SIPENDAR)

DALAM rangka memutus mata rantai pendanaan terorisme, PPATK mengembangkan aplikasi SIPENDAR yang merupakan komitmen bersama antara PPATK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Sejak diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2021, aplikasi SIPENDAR telah memfasilitasi pertukaran informasi transaksi

yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme serta menjadi wadah, *database*, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen terkait pendanaan terorisme yang dapat dibagikan informasinya melalui pemberian hak akses pihak berkepentingan secara selektif terbatas, guna mempercepat penelusuran atau deteksi adanya kegiatan terorisme melalui *follow the money* sebelum serangan terjadi. Pada tahun 2022, PPATK telah mengadakan webinar yang disebut dengan Klinik SIPENDAR yang diadakan setiap hari Senin untuk membantu Pihak

Efektifitas Aplikasi SIPENDAR selama periode Agustus 2021 s.d. Juni 2022

Registrasi Pihak Pelapor (PJK)	854 PJK telah teregistrasi pada aplikasi SIPENDAR			
	2.238 Petugas PJK telah teregistrasi pada aplikasi SIPENDAR			
Jumlah Daftar Pantau (<i>watchlist</i>) yang dipublikasikan PPATK	Nama Daftar Pantau (<i>watchlist</i>)	Tanggal Publikasi	Jumlah Nama Individu	Jumlah Nama Korporasi
	<i>Initial Watchlist</i>	13-Okt-2021	6.459	285
	<i>Watchlist TW I</i>	13-Jan-2022	450	91
	<i>Watchlist TW II</i>	13-Apr-2022	125	12
	Total		7.034	388
Jumlah permintaan informasi melalui aplikasi SIPENDAR	195 permintaan informasi dari stakeholder kepada PPATK			
	1.236 permintaan informasi dari PPATK kepada PJK			

Pelapor yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi secara mandiri. Selain itu, terdapat Klinik Registrasi SIPENDAR dengan menargetkan jenis industri tertentu yang dijadwalkan secara rutin setiap bulannya guna menjangkau seluruh Pihak Pelapor.

Selama periode Agustus 2021 s.d. Juni 2022, permintaan informasi dalam aplikasi SIPENDAR telah mencapai 195 permintaan informasi dari aparat penegak hukum untuk membantu dalam mengidentifikasi potensi

kegiatan teroris atau pendanaan terorisme, serta mendukung proses penyelidikan sebelum adanya serangan terorisme.

“ **Aplikasi SIPENDAR** telah memfasilitasi pertukaran informasi serta menjadi **wadah, database, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen** terkait pendanaan terorisme ”





**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
“KUALITAS LAPORAN DAN RISIKO TPPU
DAN/ATAU TPPT PADA JASA PENUKARAN
VALUTA ASING DAN PENGIRIMAN UANG
BUKAN BANK” TAHUN 2022**

Pedagang valuta asing dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) termasuk sektor industri yang berisiko tinggi untuk dimanfaatkan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan hasil *National Risk Assesment* (NRA) Tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut,

PPATK mengadakan FGD bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Medan – Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2022 yang dihadiri oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Afiliasi KUPVA BB Pusat, dan 39 KUPVA BB serta 7 PTD Medan – Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan ini guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta



memahami perkembangan tipologi dan Risiko TPPU dan/atau TPPT terhadap Pemanfaatan Laporan yang disampaikan oleh KUPVA BB dan PTD dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau TPPT. Pertemuan tersebut juga mendorong pembentukan/pengaktifan kembali Afiliasi KUPVA BB di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya bersama memahami proses bisnis, hak dan kewajiban penyelenggara serta berkoordinasi dengan LPP dan PPAK guna mendukung Pencegahan

dan Pemberantasan TPPU dan TPPT secara lebih efektif dan optimal serta berkoordinasi dengan LPP untuk mendorong KUPVA BB dan PTD yang belum melakukan registrasi dan penyampaian laporan kepada PPAK melalui Aplikasi goAML.

Pengawasan Kepatuhan di bidang Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

DIREKTORAT Pengawasan Kepatuhan Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi memiliki alokasi Anggaran sebesar Rp530.925.000,00 dengan IKU “Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor”. Untuk mencapai IKU tersebut, DPK PBJP didukung dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Indeks kepatuhan pihak pelapor;
2. Persentase pemenuhan manajemen internal;
3. Peningkatan Kompetensi Pegawai;
4. Persentase .

“Sebagai upaya peningkatan kepatuhan PBJP dalam melaksanakan **kewajiban pelaporan adalah melalui audit kepatuhan**. Dari target 64 audit kepatuhan saat ini telah terlaksana 22 audit kepatuhan.”

Moh Shalehuddin Akbar

Plt. Direktur Pengawasan Kepatuhan
Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan
Profesi

Pada IKK “Indeks kepatuhan pihak pelapor” ditargetkan sejumlah 4 indeks selama satu tahun. Namun pada pelaksanaannya pada semester I tahun 2022 sudah mencapai 5 indeks. Artinya, Indikator tersebut telah tercapai 100%. IKK kedua yaitu “Persentase



pemenuhan manajemen internal” telah tercapai 80% dari target 100%. Serta IKK “Persentase ” men-capai 44,58%. Selanjutnya, IKK “Peningkatan Kompetensi Pegawai” ditargetkan sebanyak 20 JP namun sampai dengan semester 1 tahun 2022 belum tercapai karena pelaksanaan ter-sebut direncanakan pada triwulan ke-3 dan ke-4.

Dalam rangka mendukung tercapainya IKK, terdapat beberapa *output* kinerja semester 1 tahun 2022 yang dimiliki DPKPBJP yaitu:

1. Hasil audit kepatuhan yang ditargetkan terdapat 110 laporan untuk tahun 2022. Pada pelaksanaannya telah tercapai sebanyak 40 laporan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan kegiatan audit kepatuhan, audit khusus, pemantauan dan Evaluasi yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun dan telah tercapai sebanyak 2 laporan;
 - b. Pelaksanaan audit kepatuhan yang ditargetkan sebanyak 64 laporan dan sudah tercapai sebanyak 22 audit yang dilakukan kepada PBJ;
 - c. Pelaksanaan audit khusus yang di-

targetkan sebanyak 6 laporan selama tahun 2022. Pada pelaksanaannya telah tercapai sebanyak 2 kali terhadap PBJ dan 3 kali terhadap Profesi;

- d. Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan Kepatuhan yang ditargetkan sebanyak 40 laporan untuk tahun 2022 dan telah tercapai sebanyak 12 laporan pemantauan terhadap PBJ; dan
- e. Evaluasi pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, dan pemantauan dan evaluasi ditargetkan sejumlah 4 laporan dalam satu tahun dan telah tercapai sebanyak 2 laporan.

Kendala yang dialami pada pelaksanaan audit oleh DPK PBJP adalah Mekanisme kerja WFH yang dilaksanakan baik auditor maupun auditee sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut berpengaruh pada *output* kinerja DPK PBJP. Selain itu, adanya perubahan ortaker PPATK menyebabkan DPK PBJP dijadikan unit eselon II. Hal tersebut berimbas pada penyesuaian terkait target, SDM, dan anggaran. Meskipun demikian, target IKK masih dapat ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.



Pengawasan Sistem Keuangan Nasional

BERDASARKAN Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan PPATK dan pelaksanaan pengawasan intern tersebut dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektorat PPATK memiliki dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Peran APIP dalam Mendukung Peningkatan Kinerja PPATK dan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal PPATK. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu Nilai Internal *Audit Capability Model* (IA-CM) APIP PPATK dan Persentase Pemenuhan Standar AAIP (Asosiasi *Auditor Intern* Pemerintah Indonesia).

Pada bulan Juni 2022 Inspektorat telah melakukan Penilaian Mandiri atas implementasi Kapabilitas APIP dengan hasil

Penilaian Mandiri Inspektorat PPATK berada di Level 4 dan akan dilanjutkan dengan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP oleh BPKP pada Semester II 2022. Sampai dengan Semester I tahun Anggaran 2022, Inspektorat telah melakukan kegiatan pengawasan internal dengan menghasilkan 32 laporan hasil pengawasan internal.

Inspektorat melakukan pengawasan internal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan PPATK sebagai bagian dari Sistem Keuangan Nasional. Beberapa kegiatan pengawasan Inspektorat pada semester I 2022, terkait dengan pengawasan Sistem Keuangan Nasional antara lain Reviu Laporan Keuangan PPATK TA 2021, Reviu dan Pengadaan Barang/Jasa dan P3DN TW I Tahun 2022, Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Usulan Revisi Anggaran TA 2022, Pendampingan

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK TA 2021, Reviu atas Usulan Revisi Anggaran terkait Penambahan *Automatic Adjustment* PPATK TA 2022, Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Semester I 2022, Reviu P3DN, dan Reviu dan Pengadaan Barang/Jasa TW II.

Pengawasan kinerja PPATK yang dilaksanakan oleh Inspektorat juga berkaitan dengan Sistem Keuangan Nasional. Misalnya, dalam Reviu Laporan Kinerja, Inspektorat menghubungkan capaian *output* dan *outcome*

setiap unit kerja dengan realisasi anggaran.

Inovasi yang telah dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan internal adalah dengan menggunakan aplikasi Simwas dan aplikasi *e-consult* dalam rangka memberikan perbaikan kualitas pelaksanaan pengawasan internal.

Inspektorat akan melanjutkan penggunaan kedua aplikasi tersebut pada Semester II TA 2022. Hambatan yang dialami oleh Inspektorat adalah Pandemi Covid19 yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Hal tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pengawasan internal bagi auditor dan auditee yang melaksanakan isolasi mandiri. Namun, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan internal di Inspektorat.



“ Inspektorat melakukan pengawasan internal di lingkungan PPATK sebagai **bagian dari Sistem Keuangan Nasional** ”

I Nyoman Jendrika
Inspektur

Shadow Economy Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka acara kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Promen-sisko) Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Acara yang diselenggarakan secara *hybrid* ini dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perwakilan dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa di 13 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran para perwakilan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta apresiasi sebesar-besarnya kepada para mentor yang terdiri dari perwakilan instansi penegak hukum dan Lembaga Pengawas Pengatur

yang telah bersedia menjadi fasilitator dalam kegiatan Promensisko ini" ungkap Fithriadi saat membuka kegiatan.

Saat ini perekonomian Indonesia sangat terbebani dengan *shadow economy* yang salah satunya berasal dari aktivitas TPPU dan TPPT. "*shadow economy* yang ada diperkirakan sebesar kisaran 8.3 persen hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)" ungkap Fithriadi. Ia memaparkan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2021 mencapai lebih dari Rp4.175 triliun. "jika data ini digunakan sebagai acuan maka *shadow economy* Indonesia menjapai Rp417.5 trilun di waktu bersamaan" lanjutnya.

Lebih lanjut pria asal Minang ini mengungkapkan bahwa kondisi *shadow economy* ini membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh



di bawah potensi riil. Ia menjelaskan jika aktivitas ekonomi dapat terdata dengan baik dan menghilangkan semua produk *shadow economy*, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dalam 20 tahun terakhir.

Upaya mengatasi *shadow economy* tersebut dapat diatasi dengan menetapkan langkah yang tepat dan sistemik, serta sinergisitas antara pemangku kepentingan. “PPATK meyakini dengan penanganan *shadow economy* dan tindak pidana ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” jelas Fithriadi.

“Penanganan ***shadow economy*** dan tindak pidana ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”

Fithriadi Muslim
Direktur Hukum dan Regulasi

Promensisko Tahun 2022 ini dilaksanakan secara serempak di tiga zona yaitu Zona I yang diselenggarakan di Kota Mataram, Zona II yang diselenggarakan di Kota Batam, dan Zona III yang diselenggarakan di Kota Makassar.



PPATK 3rd Legal Forum

"Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (*Carbon Tax*)" : Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang Pada Pajak Karbon

DALAM rangka mewujudkan komitmen Indonesia pada global dan mendukung program Pemerintah mewujudkan *Green Economy*, Pemerintah akan menerapkan pajak karbon melalui mekanisme *cap and tax* pada tanggal 1 April 2022 sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dunia. Dalam rangka memastikan bahwa

pelaksanaan pengenaan pajak karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tersedianya mitigasi risiko *Green Financial Crime*, khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana korupsi, *fraud*, dan tindak pidana asal lainnya.



Penerbitan Buku Pintar TPPU

Bersama Perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI

DALAM rangka penyamaan persepsi dan untuk mengatasi berbagai kendala dari aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan penyusunan Buku Panduan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa pada

tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April 2022, Direktorat Hukum dan Regulasi PPAK telah mengadakan kegiatan konsinyering dalam rangka finalisasi draf buku pintar TPPU, serta dalam rangka mempersiapkan rencana kegiatan peluncuran buku pintar dengan perwakilan dari instansi penegak hukum yaitu Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI.





Informasi & Analisis Dukungan Penegakan Hukum

PUSAT Teknologi Informasi memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan data serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK. Pusat TI terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada mitra kerja Pusat TI melalui indeks kualitas layanan TI. Indeks kualitas layanan TI adalah tingkat kualitas atas layanan TI yang diberikan kepada pengguna TI di PPATK dengan cara membandingkan antara persepsi kepuasan pengguna layanan TI dengan harapan pengguna layanan TI. Capaian kinerja semester I tahun 2022 terkait kualitas layanan

TI memperoleh indeks 4,39 yang telah berhasil melampaui target dengan indeks 3,25. Indeks Kualitas Layanan TI diukur menggunakan metode ServQual berdasarkan kuesioner yang dikirimkan kepada pengguna layanan TI di PPATK. Penghitungan indeks dilakukan berdasarkan lima dimensi yang menjadi ukuran kualitas layanan TI, yaitu *Tangibles* (bukti terukur), *Reliability* (keandalan), *Responsiveness* (tanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Emphaty* (empati).

Peningkatan kualitas layanan TI melalui penyampaian informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas *core* PPATK yaitu melalui integrasi data untuk membantu para analis

Siklus Integrasi SIPENDAR - goAML

01 WATCHLIST / INQUIRY

Permintaan pengayaan



02 LAPORAN MASUK

Pihak pelapor menyampaikan laporan melalui SIPENDAR dan tersimpan didalam basis data SIPENDAR



03 GENERATE LAPORAN

Penyesuaian laporan dengan goAML



SIPENDAR

04 INTEGRASI SIPENDAR - GOAML

Laporan terduga pendanaan terorisme dapat diakses melalui goAML

dalam proses pencarian informasi. Integrasi dilakukan dengan data yang terdapat pada aplikasi SIPENDAR dan GoAML. Manfaat dari integrasi ini adalah informasi/data (laporan dan transaksi) terlapor sebagai *watchlist* atau *inquiry* tindak pidana terorisme dapat diakses melalui GoAML dan dapat saling terintegrasi dengan tindak pidana lainnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pusat Teknologi Informasi adalah kurangnya jumlah personil *programmer* untuk melakukan pengembangan integrasi data tersebut.

Proses integrasi data SIPENDAR dan goAML akan dimulai dengan aplikasi SIPENDAR menjalankan *background proses (job)* untuk melakukan pemeriksaan pengayaan *watchlist* dan *inquiry* SIPENDAR yang belum di sesuaikan dengan formal goAML. *Job* tersebut akan mengambil pengayaan *watchlist* dan *inquiry* yang belum masuk kedalam goAML dalam setiap *batch*. Hal ini untuk optimalisasi proses integrasi data. Data pengayaan *watchlist* dan *inquiry*

yang telah berhasil di-*generate* datanya akan di-*update* statusnya sebagai penanda bahwa laporan tersebut sudah masuk kedalam goAML.

Kemudian File pengayaan *watchlist* dan *inquiry* tersebut kemudian akan dipindahkan datanya secara otomatis ke server perantara untuk menjalankan proses integrasi data tersebut ke aplikasi goAML.

Manfaat dari integrasi ini adalah informasi/data (laporan dan transaksi) terlapor sebagai *watchlist* atau *inquiry* tindak pidana terorisme dapat diakses melalui goAML, dan dapat saling terintegrasi dengan tindak pidana lainnya. Hal ini akan sangat memudahkan analis dalam proses pencarian informasi.

Namun tidak dapat dipungkiri, keterbatasan *Resouce / Programmer* yang dimiliki saat ini masih menjadi kendala yang seringkali berpengaruh pada pelaksanaan proses integrasi ini.



“ **Peningkatan kualitas layanan TI** melalui penyampaian informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas *core* PPATK melalui integrasi data ”

Maimirza

Kepala Pusat Teknologi Informasi



Inovasi dalam Pemberantasan

PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Perpes No. 10 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 4 Perpres No. 10 Tahun 2022 fungsi PPATK yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Mengacu pada tugas dan fungsi PPATK, terdapat isu strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu belum optimalnya identifikasi terkait pencucian uang dan belum berkembangnya pemberdayaan pihak swasta dalam bentuk *Regulatory Technology*.

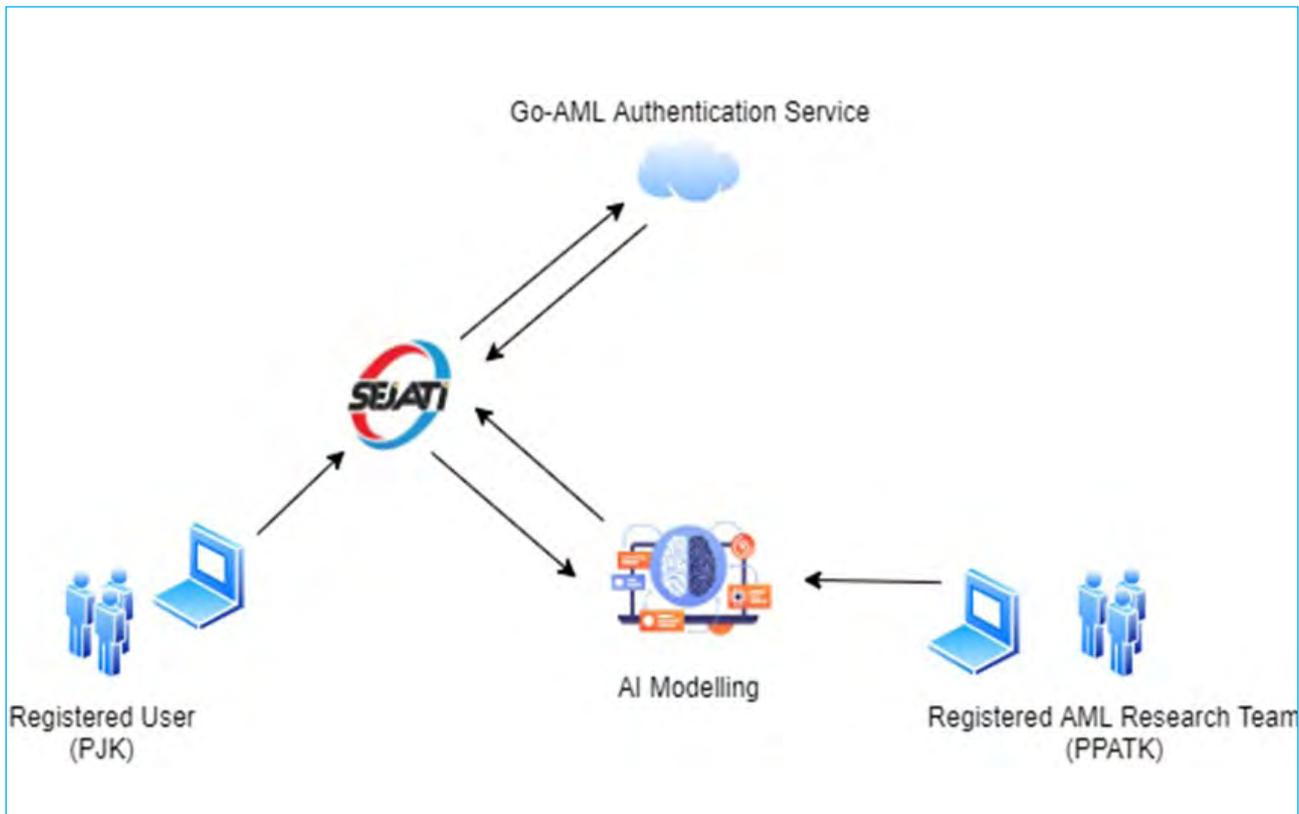
Menjawab tantangan isu strategis tersebut, PPATK membuat terobosan baru dengan membuat Sistem Pengawasan Kepatuhan Jasa Keuangan Berbasis *Artificial Intelligence* (SEJATI) yang akan diimplementasikan di seluruh Penyedia Jasa Keuangan. Adapun tujuan dari pembuatan SEJATI antara lain:

- a. Menurunkan permintaan informasi pada tahap penyelidikan karena database PPATK sudah lengkap;
- b. Meningkatkan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang akurat;
- c. Meningkatkan persentase laporan TKM PJK yang dapat diidentifikasi tindak pidananya hingga 90%;
- d. Meningkatkan persentase laporan TKM yang berasal dari luar Jakarta;
- e. Menghilangkan redudansi atau temuan berulang dalam audit;

- f. Mengurangi jumlah Laporan PJK yang ditolak;
- g. Meningkatkan persentase kecocokan indikasi tindak pidana laporan TKM dengan profil risiko; dan
- h. Meningkatkan efektivitas proses pengawasan identifikasi TKM oleh PJK.

Dalam melakukan pembuatan SEJATI, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi. Kendala dalam pembuatan sistem berupa minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang secara penuh bertanggung jawab dalam pembuatan SEJATI. Selain itu terbatasnya infrastruktur yang andal dalam

ARSITEKTUR APLIKASI SEJATI



melakukan identifikasi TKM dalam jumlah besar dan cepat. Tantangan pembuatan SEJATI hadir dalam pengembangan model identifikasi TKM menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* yang lebih efisien dan akurat.

Arsitektur SEJATI terbagi atas sistem autentikasi Go-AML dan pemodelan *Artificial Intelligence*. SEJATI dapat diakses oleh PJK

yang terdaftar pada sistem autentikasi Go-AML. SEJATI melakukan identifikasi TKM menggunakan model *Artificial Intelligence* yang dikembangkan oleh tim PPATK. Hasil identifikasi TKM oleh SEJATI dapat diakses kembali oleh PJK terdaftar.

“ SEJATI hadir dalam **pengembangan model identifikasi TKM** menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* yang lebih efisien dan akurat ”

Syahril Ramadhan
Direktur Pengawasan Kepatuhan
Penyedia Jasa Keuangan





Pindai disini
untuk membaca versi digital



LAPORAN SEMESTER
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2022

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id